

**KONFLIK
UMAT ISLAM DAN HINDU DI INDIA
PADA ERA NARENDRA MODI
TAHUN 2014-2023**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

GHIFARI AHMAD DZAKY

18323218

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

**KONFLIK
UMAT ISLAM DAN HINDU DI INDIA PADA ERA NARENDRA MODI
TAHUN 2014-2023**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

GHIFARI AHMAD DZAKY

18323218

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK UMAT ISLAM DAN HINDU DI INDIA
PADA ERA NARENDRA MODI
TAHUN 2014-2023

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

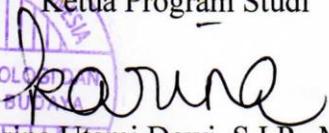
Pada Tanggal

29 April 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi


Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

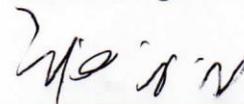
Dewan Penguji

1. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M. Sc.

2. Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.

3. Gustri Eni Putri, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan







PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 29 April 2024



Ghifari Ahmad Dzaky

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ghifari Ahmad Dzaky

No. Mahasiswa : 18323218

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Konflik Umat Islam dan Hindu di India Pada Era Narendra Modi
Tahun 2014-2023

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang di junjung Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 22 Mei 2024

Yang menvatakan,



Ghifari Ahmad Dzaky

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	
HALAMAN PERNYATAAN	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	12
1.8 Metode Penelitian	13
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	13
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	13
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	13
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	14
1.9 Sistematika Pembahasan	14
BAB II HUBUNGAN MUSLIM DAN HINDU SERTA PENGARUH HINDUTVA DAN NARENDRA MODI TERHADAP ISLAM DI INDIA	16
2.1. Hubungan muslim dan hindu di india pada masa kolonialisme inggris hingga saat ini	16
<i>2.1.1 Hubungan Muslim dan Hindu di India pada masa kolonialisme Inggris sampai Kemerdekaan</i>	16
<i>2.1.2 Hubungan Muslim dan Hindu di India setelah kemerdekaan hingga masa kini</i>	
2.2 Pokok Pemikiran Hindutva dan Pandangan Pemerintahan Narendra Modi terhadap Islam di India	
<i>2.2.1 Hindutva dan Pokok Pemikirannya</i>	
<i>2.2.2 Pandangan Pemerintahan Narendra Modi Terhadap Islam di India</i>	
BAB III ANALISIS PERBEDAAN TUJUAN PENYEBAB TERJADINYA	

KOMPETISI POLITIK DAN KONFLIK BERKEPANJANGAN DAN KONSEKUENSINYA	41
3.1. Perbedaan Tujuan antara Kelompok Hindu-Muslim di India	42
3.2. Kompetisi Politik antara Hindu-Muslim di India	
3.3. Konflik Berkepanjangan antara Hindu-Muslim di India	
3.4. Konsekuensi Konflik	
BAB IV PENUTUP	58
4.1. Kesimpulan	58
4.2 Rekomendasi	59
DAFTARPUSTAKA	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Teori Konflik Realistis (Taylor&Moghaddam 1987)

Gambar 3. Hubungan Hindu&Muslim

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. Jumlah Populasi Agama di India

DAFTAR SINGKATAN

BJP: Bharatiya Janata Party

EIC: The East India Company

RSS: Rasthriya Swayamsevak Sangh

VHP: Vishva Hindu Parishad

UU: Undang-Undang

RUU: Rancangan Undang-Undang

NRC: National Register Citizenship

AIMIM: All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen

CAA: Citizen Amandemen Act

HAM: Hak Asasi Manusia

Abstrak

Agama Islam dan Hindu memiliki hubungan erat yang menyertai pembentukan negara India. Hubungan kedua agama telah lama melekat dalam budaya dan masyarakat India selama ribuan tahun, dan senantiasa diwarnai dengan sikap saling menerima dan memahami. Hubungan baik umat Hindu-Muslim perlahan mulai berubah saat Inggris datang menjajah, perseteruan dan konflik diantara kedua umat beragama semakin sering terjadi, walaupun hubungan antara keduanya membaik setelah kemerdekaan India, namun tetap ada perseteruan dan konflik diantara keduanya, hingga puncak perseteruan antara umat Hindu dan Muslim adalah saat Narendra Modi menjadi Perdana Menteri India. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori konflik realistik dari Saul Mc Leod yang menjelaskan bahwa hubungan antarindividu dan antar kelompok dapat terjadi harmonisasi dan berkonflik. Darisini dapat difahami bahwa hubungan diantara umat Islam dan Hindu di India dapat terjadi harmonisasi dan berkonflik.

Kata-kata kunci: Budaya, Inggris, Teori Konflik Realistik, konflik, harmonisasi

Abstract

Islam and Hinduism have a close relationship that accompanied the formation of the Indian state. The relationship between the two religions has long been embedded in Indian culture and society for thousands of years, and has always been characterized by an attitude of mutual acceptance and understanding. The good relationship between Hindus and Muslims slowly began to change when the British came to colonize, feuds and conflicts between the two religious communities became more frequent, although relations between the two improved after India's independence, there were still feuds and conflicts between the two, until the peak of the feud between Hindus and Muslims were when Narendra Modi became Prime Minister of India. In this research the author uses realistic conflict theory from Saul Mc Leod which explains that relationships between individuals and between groups can occur in harmony and conflict. From this it can be understood that relations between Muslims and Hindus in India can be harmonious and conflictual.

Key words: culture, English, Realistic Conflict Theory, conflict, harmonious

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agama Islam dan Hindu memiliki hubungan erat yang menyertai pembentukan negara India. Hubungan kedua agama melekat kuat dalam budaya dan masyarakat India selama ribuan tahun, dan senantiasa diwarnai dengan sikap saling menerima dan memahami. Satu millenium lamanya umat Hindu-Muslim hidup berdampingan dengan damai dan sebagian besar India bersifat *Sinkretisme*. *The New Yorker* menuliskan bahwa hubungan yang telah lama terjalin antara agama Islam dan Hindu berdampak dengan menyatunya aspek agama dan budaya antarkeduanya, yang menghasilkan bahasa baru seperti Urdu dan Deccani. Dalam interaksi antara kedua umat beragama, umat Muslim sufi sering menganggap kitab suci Hindu sebagai sesuatu yang surgawi (Narayanan, Hubungan Hindu-Muslim di India, 2020).

Hubungan baik yang terjalin diantara umat Hindu-Muslim secara perlahan mengalami perubahan saat Inggris datang menjajah India. Pada tahun 1858 Inggris memasuki India untuk melakukan penjajahan. Para penguasa Inggris terkejut dengan kekuatan gabungan Hindu-Muslim yang mampu bersatu bergerak melawan tentara pasukan Inggris. Melihat kekuatan gabungan kelompok Hindu-Muslim yang dapat membahayakan, Pemerintah Inggris mulai mencari solusi. Pada akhirnya pemerintah Inggris menemukan solusi untuk memecah kekuatan gabungan Hindu-Muslim dengan memberlakukan kebijakan *divide and rule*. Sikap Inggris dalam meredam kekuatan gabungan Hindu-Muslim berlanjut dengan

memberlakukan kebijakan lainnya seperti pada tahun 1905 Inggris membagi Benggala menjadi dua wilayah, wilayah Timur yang didominasi Muslim sementara wilayah Barat yang didominasi Hindu.

Inggris membagi Benggal bukan tanpa alasan, hal itu karena Inggris mengetahui bahwa Bengali adalah negara pertama yang menerima pendidikan bahasa Inggris, masyarakatnya memberdayakan intelektualisme serta menjadi pelopor gerakan kemerdekaan, bahkan Raja muda India, Lord Curzon menjelaskan tentang Bengali, menurutnya “persatuan Bengal adalah sebuah kekuatan; perpecahan di Bengali akan terjadi dalam beberapa cara yang berbeda.” (Narayanan, Hubungan Hindu-Muslim di India, 2020). Oleh karena itu Inggris memecah Bengal karena menyadari bahwa Provinsi yang bersatu akan menjadi ancaman bagi kekuatan Inggris. Kebijakan lainnya yang dilakukan Inggris adalah pemberlakuan UU Morley-Minto tahun 1909 untuk memberikan daerah pemilihan sendiri bagi umat Muslim, dan hal tersebut membuat kecewa umat Hindu. Strategi yang dilakukan Inggris berhasil karena menyebabkan kelompok berbeda keyakinan seperti umat Hindu-Muslim semakin kuat permusuhannya, serta menyebabkan keharmonisan komunal diantara kedua kelompok terkikis (Narayanan, Hubungan Hindu-Muslim di India, 2020).

Kolonialisme Inggris di India yang sudah lama akhirnya berakhir, Kemerdekaan India pada 15 Agustus 1947 mengakhiri penderitaan masyarakat di bawah pemerintahan kolonial, serta menjadi awal dari perubahan India menjadi negara yang lebih maju dan berkembang. Kemerdekaan India menjadi suka-cita bagi umat beragama karena mereka akan dapat menjalani hidup dan beribadah dengan bebas dan nyaman. India merupakan rumah bagi umat Beragam agama

seperti umat Hindu, Sikh, Jain, serta menjadi tempat bagi populasi Muslim terbesar di dunia dan jutaan umat Kristen dan Budha. Keberagaman umat di India memerlukan adanya toleransi, dan masyarakat India memahami pentingnya toleransi beragama sebagai bagian dari diri mereka sebagai sebuah bangsa. Toleransi sebagai nilai bersama yang dipegang bersamaan dengan keyakinan yang melintasi batas agama, umat Hindu yang merupakan mayoritas diikuti oleh umat Muslim mempercayai tentang karma, setelahnya umat Kristen bersama dengan umat Hindu yang mempercayai kekuatan pemurnian sungai Gangga yang merupakan kepercayaan dalam agama Hindu, di India Utara umat Hindu, Sikh dan Muslim menganut tasawuf yang merupakan tradisi mistik yang erat dengan Islam, bahkan sebagian masyarakat India dengan latar belakang agama besar mempercayai bahwa menghormati orang yang lebih tua merupakan hal yang penting dalam keyakinan mereka.

Kehidupan umat beragama di India dengan nilai-nilai kebaikan yang dipegang seperti saling toleransi, saling menghormati perbedaan kepercayaan, tidak menjamin kehidupan umat beragama di India berjalan harmonis. Beragam peluang terjadinya sentiment antar umat beragama terjadi di India, dan hal tersebutlah yang dilakukan oleh anggota komunitas agama besar di India yang mereka tidak memiliki banyak kesamaan dengan anggota komunitas agama lainnya. Umat Hindu memandang mereka sangat berbeda dengan umat Islam, umat Islam membalas sentiment agama tersebut dengan memandang bahwa mereka sangat berbeda dengan umat Hindu, terdapat sedikit pengecualian bagi penganut Jain dan Sikh, dua pertiga dari penganut Jain serta separuh dari penganut Sikh memandang bahwa mereka memiliki banyak kesamaan dengan umat Hindu, namun terlepas dari

pandangan setiap umat Beragama, komunitas agama besar di India cenderung beranggapan mereka berbeda dari komunitas agama lain. Umat Islam merupakan umat agama terbesar kedua setelah umat Hindu di India. Historis hubungan antara umat Hindu dan Islam begitu rumit, karena kedua umat beragama mampu hidup berdampingan dengan damai, namun tetap diwarnai dengan terjadinya kerusuhan dan kekerasan sipil (Center, Agama di India: Toleransi dan Segregasi, 2021).

Perseteruan dan konflik diantara umat Hindu-Muslim India yang sudah lama ada semakin meningkat pada saat Narendra Modi menjabat sebagai Perdana Menteri India. Peningkatan konflik antara umat Hindu-Muslim di India pada era pemerintahan Narendra Modi disebabkan oleh komunalisme atau nasionalisme agama yang telah mengakar kuat sejak lama. Kelompok-kelompok di India seperti umat Hindu, Muslim, Sikh, Kristen, masing-masing komunitas memiliki kepentingan sekuler yang berbeda yang merujuk kepada agama. Komunalisme di India dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan serta partai politik yang menggunakan sentiment Hindu untuk mendapatkan suara masyarakat. Berbagai macam kelompok nasionalis Hindu terdapat di India seperti *Rashtriya Swayamsevak Sangh* (RSS), Vishva Hindu Parishad (VHP), Bajrang Dal, dan Bharatiya Janata Party (BJP) disebut dengan *The Sangh Parivar*, kelompok-kelompok nasionalis tersebut berusaha mewujudkan *Hindu Rashtra* yaitu negara India yang berlandaskan nilai-nilai kehinduan. Pembangunan India sebagai negara Hindu merupakan target dari ideologi Hindutva, pembentukan India menjadi negara Hindu bertujuan untuk menyelaraskan kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan nilai-nilai budaya Hindu (Sudha, 2020).

Kekerasan dengan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Perdana Menteri Narendra Modi mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak, termasuk kritikan dari sebuah lembaga hak asasi manusia di India *The Alliance for Justice and Accountability* yang menyatakan “Kemenangan BJP dalam pemilu nasional India pada Mei 2014 membawa tampuk kekuasaan sebuah partai yang secara terbuka mendukung Hindutva, sebuah ideologi ultranasionalis yang ditandai dengan kebencian ekstrim terhadap Muslim, Kristen dan agama minoritas lainnya. Sebenarnya pemilih Hindutva minoritas diantara umat Hindu. BJP berkuasa dengan janji pembangunan inklusif, sementara juga memuaskan basis inti supremasi Hindu mereka yang dipimpin RSS dan banyak afiliasinya. Hasilnya selama tiga tahun terakhir, hanya bisa disebut serangan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan beragama minoritas yang mengejutkan baik dalam intensitas maupun keberaniannya” (Sajjad M. W., 2018).

The Alliance for Justice and Accountability berpendapat bahwa kekerasan terhadap kelompok minoritas meningkat sejak India di pimpin oleh BJP pada tahun 2014. Kekerasan yang diterima oleh kelompok minoritas, termasuk umat Muslim merupakan hasil dari implementasi ideologi *Hindutva* yang memarjinalkan kelompok lain selain umat Hindu. Konflik komunal antara kelompok Hindu nasionalis dengan kelompok minoritas, terkhusus Muslim memanjang setelah BJP kembali memenangkan pemilu pada tahun 2019, setelahnya konflik komunal terus berkembang sampai tahun 2023. Sejatinya kelompok Hindu nasionalis merupakan minoritas dari umat Hindu India, namun usaha mereka dalam menjalin ikatan dengan politisi BJP, mengasihkan kekuatan besar berupa sebuah aliansi untuk menggerakkan kebencian komunal, kebencian komunal yang digaungkan oleh

kelompok nasionalis Hindu bersama dengan politisi BJP menyebabkan masyarakat Hindu India yang merupakan mayoritas terpengaruh, hingga akhirnya terbawa suasana ikut andi dalam melakukan kekerasan terhadap kelompok minoritas.

Dalam usaha menciptakan nuansa kebencian umat Hindu terhadap umat Muslim, yang berlanjut dengan konflik diantara kedua umat beragama, BJP melakukannya dengan berbagai cara. Mulai dari mengangkat isi keagamaan yang bersifat klasik seperti isu perlindungan terhadap situs-situs keagamaan dan penghormatan terhadap simbol-simbol keagamaan, isu klasik lainnya adalah terkait dengan perlindungan sapi, dimana sapi merupakan hewan yang dimuliakan oleh umat Hindu di India, dan mereka menggapnya sebagai dewa dan ibu bangsa Hindu, adapun isu kontemporer yang digaungkan oleh BJP dan RSS adalah terkait ‘Jihad Cinta’. Usaha yang dilakukan BJP tidak berhenti dengan membuat umat Hindu membenci umat Muslim, namun para politisi BJP juga menarik simpati umat Hindu untuk mendukung dan memilih politisi BJP, dan hal tersebut dilakukan dengan cara menghidupkan kebencian terhadap umat Muslim dengan narasi-narasi bahwa umat Muslim merupakan kelompok asing yang menjadi ancaman terwujudnya *Hindu Rashtra*. Usaha selanjutnya yang dilakukan oleh politisi dan elit BJP adalah dengan memberikan perlindungan secara diam-diam (*silently supporting*) untuk pelaku kekerasan terhadap umat Muslim agar mereka terbebas dari hukuman atau setidaknya mendapatkan keringanan hukuman.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, dalam penelitian ini penulis akan mengangkat rumusan masalah yaitu “ Bagaimana terjadinya konflik

antara umat Islam dan Hindu Nasionalis di India pada era Narendra Modi tahun 2014-2023 ? ”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana terjadinya konflik antara umat Islam dan Hindu Nasionalis di India pada era Narendra Modi tahun 2014-2023.

1.4 Cakupan penelitian

Dalam Penelitian ini mencakup pembahasan tentang konflik umat Islam dan Hindu. Konflik yang terjadi yaitu antara umat Islam dan umat Hindu nasionalis dengan ideologinya Hindutva, kelompok Hindu nasionalis bekerjasama dengan politisi BJP menghidupkan kebencian umat Hindu India lainnya terhadap umat Muslim yang dianggap sebagai ancaman terhadap terbentuknya India menjadi *Hindu Rashtra*. Adapun cakupan tahun 2014-2023 adalah karena pada 2014 merupakan awal dari terpilihnya Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India yang kemudian menjalankan pemerintahan dengan membuat berbagai macam kebijakan-kebijakan untuk masa jabatan pertamanya sebagai Perdana Menteri di India hingga kemudian berakhir dan kemudian Narendra Modi kembali terpilih menjadi Perdana Menteri di India untuk masa jabatan keduanya yang berakhir pada 2023.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu ada yang telah membahas tentang hubungan antara umat Islam dan Hindu di India serta berbagai konflik yang terjadi diantara kedua

pemeluk agama tersebut, berikut adalah jurnal dan penelitian yang memiliki bahan kajian yang sama dengan penelitian ini:

Paul R. Brass (2003), *The Production Of Hindu-Muslim Violence In Contemporary India*, menganalisis terjadinya kerusuhan yang terstruktur penyebab konflik umat Islam dan Hindu di India. Menguraikan akan adanya kekejaman yang direncanakan dengan matang sehingga dampaknya nanti yaitu kekerasan yang dilakukan oleh umat Hindu terhadap umat Islam baik dalam skala kecil atau besar, dimanapun dan kapanpun. Pembahasan dalam buku tersebut kearah mencari penyebab dari kekerasan umat Hindu terhadap umat Islam di India (Brass, 2003).

Ashutosh Varshney (2002), *Ethnic Conflict and Civic Life Hindus and Muslims in India*, mengkaji keseharian hidup bernegara antara umat Islam dan Hindu di India sampai akhirnya terjadi konflik diantara keduanya. Umat Islam dan Hindu merupakan dua kelompok masyarakat yang menetap di India, umat Islam dan Hindu pada awalnya hidup damai bersama tanpa adanya pertentangan dan permasalahan, kondisi tersebut berubah saat umat Hindu terdampak provokasi yang mengabarkan keburukan umat Islam hingga akhirnya terjadilah konflik antara umat Islam dan Hindu di India. Buku ini juga membahas penyebab terjadinya konflik antara umat Islam dan Hindu di India (Varshney, 2002).

Randy Wirayudha (2020), *Konflik Muslim-Hindu India dari Masa ke Masa*, memfokuskan kajiannya pada peran negara India yang merupakan negara maju dengan segala kelebihan baik dibidang militer dan juga dunia perfilman yang dimilikinya yaitu Bollywood, namun ada hal memperhatikan yaitu adanya konflik antara umat Islam dan Hindu yang didasari akan masalah agama. Umat Islam dan Hindu merupakan dua kelompok masyarakat di India yang pada awalnya hidup

damai namun semua berubah menjadi konflik diantara dua kelompok umat beragama tersebut setelah adanya Undang-Undang Kewarganegaraan (Wirayudha, 2020).

Mohammad Pandu (2020), *Konflik Muslim-Hindu di India adalah Buah dari Mayoritarianisme yang Melembaga, Alih-alih Agama*, berisikan bagaimana kekerasan yang dilakukan oleh umat Hindu di India berdampak memunculkan kemarahan umat Islam terhadap umat Hindu di tempat lain. Kekerasan yang diterima umat Islam dari umat Hindu di India secara tidak langsung dapat menjadikan umat Islam ditempat lain berniat membalasnya. Penelitian ini tidak melihat kondisi hubungan umat Islam dan Hindu di wilayah lain (Pandu, 2020).

Abdul Shaban (2012), *Lives Of Muslims In India Politics, Exclusion And Violence*, berisi tentang seputar kehidupan umat Islam baik dalam aspek perpolitikan hingga akhirnya terintimidasi oleh umat Hindu di India. Menjelaskan akan kondisi global dan domestik yang memiliki pengaruh besar terhadap suatu masyarakat dan juga umat beragama, khususnya dunia global yang banyak menyudutkan Islam menjadi tekanan berat bagi umat Islam di India karena intimidasi umat Hindu yang semakin kuat dampak dari pandangan yang didapat dari dunia global. Penelitian ini tidak membahas dampak dunia global akan bertambahnya intimidasi terhadap umat Islam (Shaban, 2018).

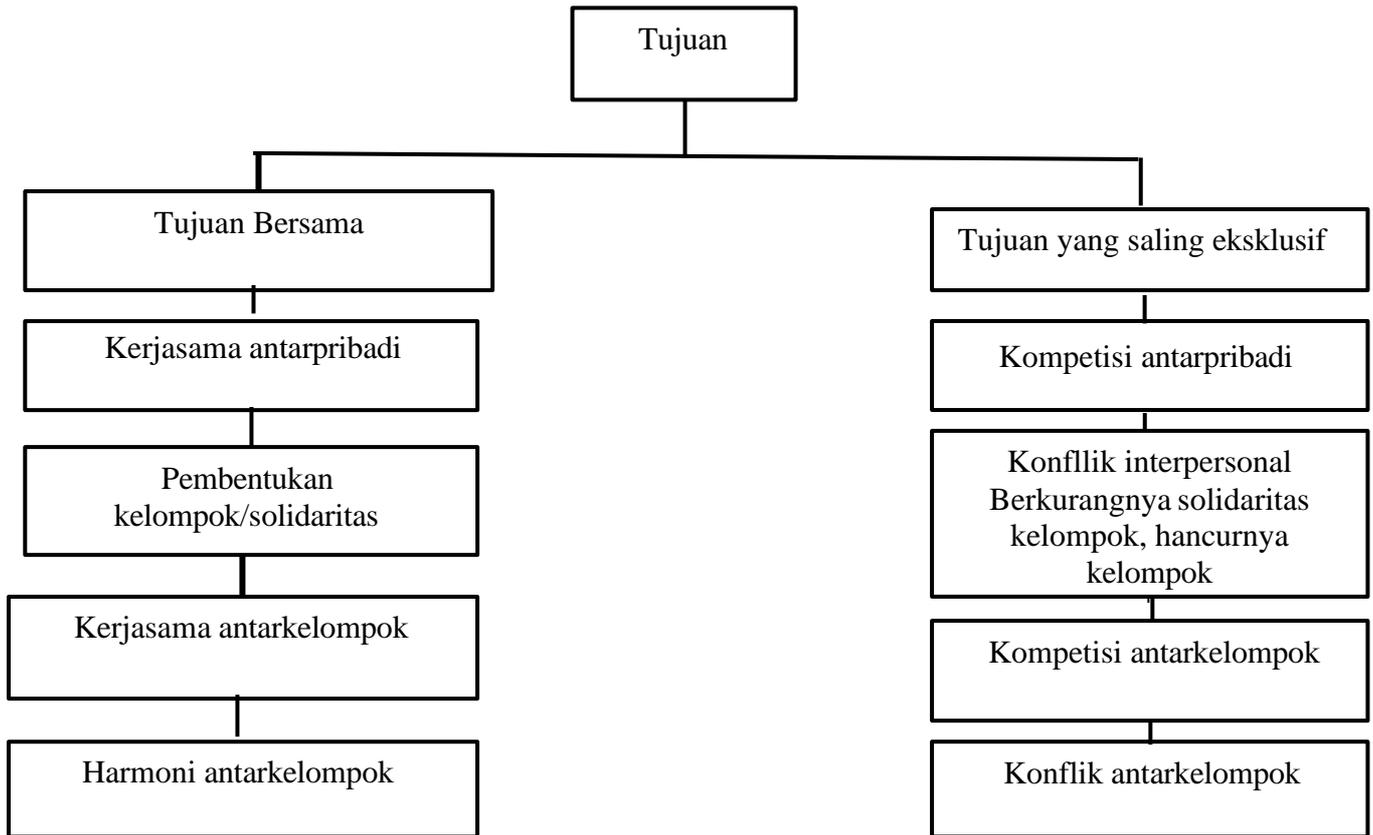
Secara keseluruhan penelitian-penelitian tersebut telah menjelaskan mengenai kondisi hubungan umat Islam dan Hindu di India serta berbagai konflik yang pernah terjadi diantara kedua etnis agama tersebut, namun penelitian terdahulu belum menganalisis faktor-faktor penyebab konflik umat Muslim dan Hindu di India lebih mendalam, terkhusus faktor-faktor yang ada saat ini yang

berpotensi menimbulkan konflik yang lebih besar dan berkepanjangan diantara umat Muslim dan Hindu di India . Penelitian ini nantinya akan menjabarkan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab konflik umat Muslim dan Hindu di India serta bagaimana konflik yang terjadi diantara kedua umat beragama yang masih berlangsung hingga saat ini.

1.6 Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan kerangka pemikiran untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Realistic Conflict Theory* atau Teori Konflik Realistik dari Saul Mc Leod. Teori konflik realistik menjelaskan bahwa tujuan yang dimiliki individu-individu dalam sebuah kelompok dapat memiliki kesamaan yang menumbuhkan semangat kerjasama antarindividu hingga kemudian terbentuk solidaritas antarindividu dari setiap kelompok, dari kerjasama dan solidaritas yang sudah terjalin antarindividu menjadikan mereka saling bekerjasama antarkelompok untuk mencapai tujuan yang sama hingga menciptakan keharmonisan hubungan antarkelompok. Dilain sisi juga terdapat individu-individu dengan tujuan yang berbeda atau bertentangan sehingga kondisi tersebut menimbulkan kompetisi antarindividu, dari kompetisi tersebut menyebabkan berkurangnya solidaritas antarindividu yang juga berpengaruh terhadap solidaritas kelompok, hingga kemudian menyebabkan adanya kompetisi antarkelompok yang menyebabkan terjadinya konflik antarkelompok.

Gambar 1. Teori Konflik Realistis (Taylor&Moghaddam 1987)



Dalam bagan diatas dijelaskan bahwa terdapat dua kondisi hubungan antarkelompok. Kondisi pertama adalah kelompok-kelompok dengan individu-individu yang memiliki kesamaan tujuan, karena memiliki kesamaan tujuan maka terbentuklah sebuah kerjasama diantara individu-individu tersebut, kerjasama yang terjalin lama diantara individu-individu tersebut menumbuhkan sikap saling percaya, penuh dengan rasa saling menghormati dan rasa tanggung jawab antarindividu hingga terbawa kedalam kelompoknya masing-masing hingga saling

menghormati antarkelompok dan darisana memunculkan kerjasama antarkelompok yang menghasilkan keharmonisan antarkelompok.

Kondisi kedua merupakan kondisi yang bertolak belakang dimulai dengan kelompok-kelompok dengan individu-individu yang memiliki tujuan yang berbeda sehingga kemudian memunculkan persaingan antarindividu didalam kelompok-kelompok tersebut hingga kemudian menyebabkan konflik antarpribadi dan menyebabkan berkurangnya solidaritas dan renggangnya hubungan antarindividu dari setiap kelompok, selanjutnya hal tersebut berdampak dengan memunculkan kompetisi antarkelompok hingga menimbulkan konflik antarkelompok.

Jika dikaitkan dengan umat Muslim dan Hindu di India, individu-individu dari kedua umat beragama memiliki tujuan yang berbeda yang saling bertentangan, sehingga secara perlahan memunculkan kompetisi antarindividu dari kedua umat beragama. Kompetisi antarindividu dari umat Muslim dan hindu secara perlahan namun pasti menyebabkan solidaritas antarindividu dari umat Muslim dan Hindu berkurang dan menghilang. Solidaritas yang berkurang dan menghilang antarindividu dari umat Muslim dan Hindu menumbuhkan sikap untuk saling bersaing yang melibatkan kelompok yang akhirnya menyebabkan terjadinya konflik diantara umat Muslim dan Hindu di India

1.7 **Argumen Sementara**

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan sejauh ini, penulis berargumen bahwa walaupun India menjadi tempat yang ramah untuk semua masyarakat dengan beragam latar belakang agama. Minimnya toleransi diantara umat beragama terkhusus diantara umat Muslim dan Hindu menyebabkan timbulnya pergesekan dan konflik diantara dua kelompok tersebut. Hal lain yang menyebabkan terjadinya

konflik diantara umat Muslim dan Hindu adalah karena perbedaan nilai-nilai prinsip dalam menjalani kehidupan, persaingan untuk menunjukkan hegemoni kekuatan juga tidak luput menjadi penyebab konflik diantara kedua umat. Konflik yang sudah ada diperpanas dengan andil dari Pemerintah India. Pemerintah India dibawah kuasa Perdana Menteri Narendra Modi bersama partai penyokongnya Bharatiya Janata Party (BJP) yang memberlakukan kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan mayoritas Hindu menjadikan konflik diantara umat Muslim dan Hindu semakin hebat.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam menjelaskan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data-data yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang nantinya akan dikembangkan untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah umat Muslim dan Hindu di India. Adapun objek penelitiannya konflik diantara umat Muslim dan Hindu.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, data-data yang akan digunakan merupakan data-data sekunder yang berasal dari media tulis seperti artikel, buku, jurnal dan juga berita-berita yang relevan dengan penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian diawali dengan memahami penelitian yang akan dilakukan, kemudian mulai mencari dan mengumpulkan data-data berupa data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya penulis membaca dan memahami data-data yang telah didapat dan dikumpulkan, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan poin-poin penting dari data sumber yang telah didapat. Kemudian membandingkan satu sumber data dengan sumber data lainnya dan setelahnya mengelompokkannya menjadi beberapa bagian dan digabungkan berdasarkan sub-sub tema dan sub-sub bab yang sama yang telah dibaca dan dibandingkan untuk nantinya dikaitkan dengan penelitian dan bagian terakhir adalah mendeskripsikan dan menjelaskan hasil dari penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dan di setiap bab memiliki sub-babnya masing-masing. Bab-bab dalam penelitian ini meliputi:

a. Bab I: Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan, penulis memaparkan penelitian berisikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

b. Bab II: Pembahasan hubungan Umat Muslim dan Hindu serta pengaruh Hindutva dan Narendra Modi terhadap Islam di India.

Pada bab kedua penulis akan menjelaskan seperti apa hubungan yang terjalin diantara umat Muslim dan Hindu di India serta bagaimana

perkembangannya yang dimulai dari abad ke-20 hingga saat ini dan juga menjelaskan pengaruh Hindutva dan Pemerintahan Narendra Modi terhadap Islam di India.

- c. Bab III: Analisis Perbedaan Tujuan Penyebab Terjadinya Kompetisi Politik Dan Konflik Berkepanjangan Dan Konsekuensinya Terhadap Hubungan Muslim Dan Hindu Di India. Pada bagian ini penulis menjelaskan analisis perbedaan tujuan diantara umat Hindu dan Muslim di India, yang berdampak dengan terjadinya kompetisi dan konflik berkepanjangan serta konsekuensi nya terhadap hubungan kedua umat beragama.

- d. Bab IV: Kesimpulan

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan kesimpulan secara keseluruhan dari penelitian juga terdapat rekomendasi terkait penelitian yang berkaitan.

BAB II

HUBUNGAN MUSLIM DAN HINDU
BESERTA PENGARUH HINDUTVA DAN NARENDRA MODI
TERHADAP ISLAM DI INDIA

2.1. Hubungan Muslim dan Hindu di India pada masa kolonialisme Inggris Hingga saat ini

Pada bagian ini akan dijelaskan dua subbab. Sub bab pertama membahas dan menjelaskan tentang hubungan Muslim dan Hindu di India pada masa kolonialisme Inggris sampai India meraih kemerdekaan. Sub bab kedua menjelaskan hubungan Muslim dan Hindu di India setelah kemerdekaan sampai saat ini.

2.1.1 Hubungan Muslim dan Hindu di India pada masa kolonialisme Inggris sampai Kemerdekaan

Inggris merupakan negara besar dengan kekuatan yang dimiliki disetiap lini, baik perekonomian dan juga tentara pertahanan (BBC, n.d). Kedatangan Inggris ke India adalah untuk menjajah dan menguasai sumber daya alam nya yang melimpah (Bellows, n.d). Dalam menjalani misinya menguasai India Inggris mengawalinya dengan mendapatkan pelabuhan strategis yang selanjutnya disusul dengan pembentukan kongsi dagang Inggris yaitu *The East India Company* (EIC) (Sholekha, 2019). Pergerakan militant Inggris untuk menguasai India bersamaan dengan melemahnya para negara pesaing seperti Portugis dan Prancis memudahkan Inggris untuk menguasai banyak wilayah-wilayah di India (Wilson, 2016). Rencana

Inggris untuk menguasai India sempat mendapatkan hadangan dari Kesultanan Mughal, namun dengan strategi yang matang Inggris mampu mengalahkan Kesultanan Mughal (Republika, 2022). Strategi Inggris selanjutnya adalah melemahkan kekuatan gabungan kelompok Hindu-Muslim, untuk itu Inggris memberlakukan kebijakan *divide and rule* untuk memecah belah kelompok Hindu-Muslim agar tidak menjadi ancaman untuk pemerintah kolonial Inggris (Republika, 2023).

Usaha Inggris untuk menguasai India terbayar lunas, karena pada akhirnya tepat pada tahun 1857 secara resmi India dikuasai oleh Inggris. Tercapainya tujuan menguasai India tidak lepas dari keberhasilan Inggris dalam meredam dan memadamkan perlawanan dan pemberontakan kekuatan gabungan masyarakat India yang terdiri dari umat Hindu dan Muslim, dan membuat mereka putus asa (Ashari, 2002). Pemberontakan yang paling diingat oleh pemerintah kolonial Inggris adalah pemberontakan “Mutiniy”. Pemberontakan “Mutiniy” merupakan pemberontakan yang digerakkan oleh umat Muslim India, oleh karena itu setelah India dikuasai Inggris, pemerintah kolonial Inggris memandang umat Islam sebagai kelompok berbahaya, hingga menyebabkan beberapa konsekuensi diantaranya, *Pertama*, tergesernya posisi Muslim dari elit kekuasaan India menjadi kelompok lapis bawah yang berusaha merebut kekuasaan kembali. *Kedua*, umat Muslim dipandang dengan penuh kecurigaan oleh orang-orang Inggris karena peran mereka dalam pemberontakan tersebut (Hamid, 2010).

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Inggris setelahnya banyak yang tidak tegas, bahkan tidak sedikit kebijakan yang dikeluarkan lebih condong mengutamakan umat Hindu dan merugikan umat Muslim. Beberapa

tuntutan kelompok Hindu nasionalis kepada pemerintah kolonial Inggris yang dianggap merupakan konspirasi terhadap umat Muslim. *Pertama*, Kampanye pemakaian bahasa Hindi dan tulisan Devandagri menggantikan bahasa Urdu. Kampanye yang dilakukan pada tahun 1900 ini dinilai oleh umat Muslim sebagai upaya umat Hindu menjadikan bahasa Hindi sebagai bahasa resmi di India.

Kondisi yang sangat memberatkan untuk umat Muslim karena pemerintah kolonial Inggris tidak peduli dengan apa yang memberatkan umat Muslim dan tetap merespon permintaan umat Hindu. Pada akhirnya bahasa Hindi mulai resmi dipakai menggantikan bahasa Urdu, dan pada waktu yang sama pemerintah kolonial Inggris mulai menerima tulisan Devandagri untuk tujuan-tujuan yang resmi. Pada 18 April 1900 Pemerintah Inggris di United Provinces, berkaitan telah disahkannya pemakaian bahasa Hindi sebagai bahasa resmi, Sir Anthony Macdonnal memerintahkan pemakaian bahasa Hindi. Kebijakan pemakaian bahasa Hindi sebagai bahasa resmi membuat kaget umat Muslim, karena bagi mereka bahasa Urdu sendiri seperti ajaran Islam yang seharusnya tidak tergantikan (Lapidus, 1999). *Kedua*, Pembatalan pembentukan wilayah Bengali sebagai provinsi mayoritas Muslim. Pada 1911 umat Muslim harus mengalami hal pahit karena harus menerima kenyataan wilayah Bengal yang sudah mulai dibentuk pada 1905 tidak jadi diperuntukkan menjadi provinsi tempat mayoritas umat Muslim, penekanan yang dilakukan kelompok Hindu terhadap pemerintah kolonial Inggris melalui *Coronation Durbar* (resepsi penobatan) menyebabkan pembentukan provinsi tersebut dibatalkan secara sepihak (Lapidus, 1999).

Pada masa kolonialisme Inggris bayak sekali perseteruan yang terjadi antara umat Hindu dan Muslim seperti yang terjadi di Kalkuta sebuah kerusuhan terjadi

diantara umat Hindu-Muslim dalam kurun waktu bulan April-Mei dan Juli yang menewaskan sekitar 140 orang, kerusuhan tersebut disebabkan oleh seorang penabuh gendang yang tetap bermain musik dekat masjid saat waktu shalat untuk acara Arya Samaj (Wirayudha, 2019).

Kerusuhan 1921 atau juga dapat dikenal dengan kerusuhan Pangeran Wales merupakan kerusuhan di Mumbai yang menjadi saksi sejarah dimana umat Hindu dan Muslim bersatu untuk menentang penjajahan Inggris. Kerusuhan tersebut melibatkan tiga aktor penting yaitu seorang pahlawan kemerdekaan India, seorang calon raja Inggris, dan kekuasaan seorang sultan Ottoman yang sudah goyah. Adapun penyebab terjadinya kerusuhan tersebut adalah perbedaan ideologi dan tujuan yaitu *swaraj* (pemerintahan sendiri), *swadeshi* (kemandirian ekonomi), larangan minuman keras, dan pan-Islamisme. Pada November 1921 Pangeran Wales, Edward VIII yang akan menjadi raja Inggris memulai tur kerajaan ke India diwaktu yang tidak tepat karena pada saat itu bertepatan dengan adanya gerakan pro-kemerdekaan dari kekuasaan Inggris yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi.

Mahatma Gandhi sebagai pemimpin gerakan pro kemerdekaan telah menyatukan kekuatan kongres nasional dan khilafah dibawah bendera persatuan Hindu-Muslim. Penggabungan kekuatan kongres nasional dan khilafah menciptakan hubungan persatuan yang kokoh diantara umat Hindu dan Muslim, namun disatu sisi penggabungan kekuatan tersebut menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan bagi kelompok minoritas saat itu seperti Kristen, Sikh, Parsi dan Yahudi. Melihat kekhawatiran dan ketakutan dari kelompok minoritas akan penggabungan kekuatan Hindu-Muslim, Mahatma Gandhi selanjutnya mengambil sikap dengan mengatakan "Aliansi Hindu-Muslim tidak berarti bahwa komunitas besar harus

mendominasi komunitas kecil," katanya. (INDONESIA, 2021). Pangeran Wales yang saat itu berkunjung ke India berharap kedatangannya akan membangkitkan sentiment loyalis dan mampu menghilangkan kekuatan gerakan Gandhi, namun yang terjadi justru sebaliknya, kelompok kongres nasional menyambut sang pangeran dengan melakukan boikot serta membakar kain buatan luar negeri untuk mengapuskan simbol imperialisme ekonomi Inggris.

Pada 17 November 1921 penduduk Bombay mengecam tindakan boikot yang dilakukan oleh kongres nasional, serta justru menyambut kedatangan pangeran Wales, mereka yang mendukung kedatangan Pangeran Wales adalah dari kelompok Parsi, Yahudi dan Anglo-India. Kelompok kongres nasional dan khilafah yang mengetahui hal tersebut sangat marah dan melakukan penyerangan ke orang-orang Parsi. Mereka bersatu menyerang dan menghancurkan toko minuman keras milik kelompok Parsi. Latar belakang penyebab kelompok kongres nasional dan khilafah menyerang toko minuman keras milik orang Parsi adalah karena toko minuman keras tersebut menjadi simbol dominasi ekonomi Parsi serta bukti perlawanan kelompok Parsi terhadap politik nasionalis. Gandhi sebagai penanggung jawab kesatuan kelompok kongres nasional dan khilafah, melihat penyerangan terhadap kelompok Parsi, ia langsung mengambil langkah untuk menyatukan pemimpin dari berbagai komunitas, dan menciptakan perdamaian.

Dalam usahanya menyatukan berbagai komunitas beragam agama tersebut Gandhi pada 19 November mengambil langkah untuk mogok makan dan minum sampai kekerasan mereda, dan usaha tersebut berhasil karena pada 22 November kekerasan mereda, dan orang-orang India dari berbagai komunitas dan aliran politik bersatu. Dalam usahanya menyatukan kelompok minoritas dan mayoritas, Gandhi

mengawalinya dengan mengambil hati kelompok minoritas agar mendapatkan kepercayaan dari mereka, selanjutnya Gandhi memberikan arahan kepada kelompok mayoritas yaitu kelompok kongres nasional dan khilafah akan pentingnya hak-hak minoritas dan melakukan perbaikan serta memberikan kesejahteraan terhadap kelompok minoritas, hingga kemudian Gandhi memberikan ruang politik yang signifikan terhadap kelompok minoritas untuk menyuarakan keraguan mereka akan taktik Gandhi serta kekhawatiran mereka akan dorongan dari kelompok mayoritas. Segala usaha yang dilakukan Gandhi dalam menyatukan kelompok mayoritas dan minoritas diakhiri dengan mengganti slogan persatuan Hindu-Muslim menjadi Persatuan Hindu-Muslim-Sikh-Parsi-Kristen-Yahudi, Slogan persatuan baru tersebut sebagai bukti untuk meyakinkan kelompok minoritas bahwa mereka memiliki tempat di India yang telah merdeka (INDONESIA, 2021).

2.1.2 Hubungan Muslim dan Hindu di India setelah kemerdekaan hingga masa kini

India merupakan negara yang pernah dijajah oleh Inggris. Selama masa kolonialisme Inggris masyarakat India mengalami banyak penindasan, kelaparan yang parah dan juga kemiskinan yang sangat memprihatinkan (Ardiansyah, 2016). India yang sudah lama berada dibawah jajahan Inggris akhirnya pada 15 Agustus 1947 mendapatkan kemerdekaannya dan dengan itu mengakhiri kekuasaan Inggris di India (Merdeka, n.d). Kemerdekaan India menjadi awal dari terbaginya Britis India menjadi dua negara merdeka terpisah yaitu Pakistan dan India. Terbentuknya Pakistan adalah hasil upaya dari kesatuan kelompok umat Muslim yang menginginkan negara sendiri untuk umat Muslim hingga akhirnya pemerintah

Inggris mengabulkan permintaan tersebut sehingga terbentuklah Pakistan dengan mayoritas umat Muslim dan India dengan mayoritas umat Hindu (Hafil, 2022).

Kolonialisme Inggris yang berakhir pada 15 Agustus 1947 menjadi awal dari kebangkitan India dari keterpurukan untuk bangkit maju berkembang dan mandiri dari berbagai macam permasalahan. Kemerdekaan India menjadi suka-cita bagi umat beragama karena mereka akan dapat menjalani hidup dan beribadah dengan bebas dan nyaman. India merupakan rumah bagi umat Beragam agama seperti umat Hindu, Sikh, Jain, serta menjadi tempat bagi populasi Muslim terbesar di dunia dan jutaan umat Kristen dan Budha. Toleransi diperlukan dalam menjalani kehidupan beragama dan masyarakat India memahami pentingnya toleransi beragama sebagai bagian dari diri mereka sebagai sebuah bangsa. Toleransi sebagai nilai bersama yang dipegang bersamaan dengan keyakinan yang melintasi batas agama, umat Hindu yang merupakan mayoritas diikuti oleh Muslim mempercayai tentang karma, setelahnya umat Kristen bersama dengan umat Hindu yang mempercayai kekuatan pemurnian suangi Gangga yang merupakan kepercayaan dalam agama Hindu, di India Utara umat Hindu, Sikh dan Muslim menganut tasawuf yang merupakan tradisi mistik yang erat dengan Islam, bahkan sebagian masyarakat India dengan latar belakang agama besar mempercayai bahwa menghormati oaring yang lebih tua merupakan hal yang penting dalam keyakinan mereka (Center, Agama di India: Toleransi dan Segregasi, 2021). Bentuk toleransi antara umat Hindu dengan umat agama lainnya termasuk muslim adalah banyak umat Hindu yang tidak mempermasalahkan bertetangga dengan umat agama lain seperti dengan Muslim, Jain, Kristen, Sikh dan Budha.

Kehidupan umat beragama di India dengan nilai-nilai kebaikan yang dipegang seperti saling toleransi, saling menghormati perbedaan kepercayaan, tidak dapat menjamin kehidupan umat beragama di India berjalan harmonis. Beragam peluang terjadinya sentiment antar umat beragama terjadi di India, dan hal tersebutlah yang dilakukan oleh anggota komunitas agama besar di India yang mereka tidak memiliki banyak kesamaan dengan anggota komunitas agama lainnya. Umat Hindu memandang mereka sangat berbeda dengan umat Islam, umat Islam membalas sentiment agama tersebut dengan memandang bahwa mereka sangat berbeda dengan umat Hindu, terdapat sedikit pengecualian bagi penganut Jain dan Sikh, dua pertiga dari penganut Jain serta separuh dari penganut Sikh memandang bahwa mereka memiliki banyak kesamaan dengan umat Hindu, namun terlepas dari pandangan setiap umat Beragama, komunitas agama besar di India cenderung memandang mereka berbeda dari komunitas agama lain. Umat Islam merupakan umat agama terbesar kedua setelah umat Hindu di India. Historis Hubungan antara umat Hindu dan Islam begitu rumit, karena kedua umat beragama ini mampu hidup berdampingan dengan damai, namun tetap diwarnai dengan terjadinya kerusuhan dan kekerasan sipil (Center, Agama di India: Toleransi dan Segregasi, 2021).

Berbagai macam kerusuhan dan konflik terjadi diantara umat Hindu-Muslim setelah kemerdekaan India beberapa diantaranya seperti yang terjadi di Kalkuta. Pada 13 Januari 1964 terjadi kerusuhan skala besar di Kalkuta. Kerusuhan tersebut dipicu karena hilangnya sebuah benda keramat di sebuah masjid di Srinagar, ibukota Jammu dan Kashmir. Hilangnya benda keramat tersebut menimbulkan kecurigaan, hingga kemudian umat Muslim menuduh umat Hindu sebagai pelakunya, kemudian secara bersamaan umat Muslim melampiaskan

kemarahannya kepada para pengungsi Hindu yang baru keluar dari Pakistan Timur (kini Bangladesh). Serangan umat Muslim terhadap umat Hindu menyebabkan korban jiwa yaitu sebanyak 29 umat Hindu tewas, hal demikian menyebabkan umat Hindu marah dan melakukan balas dendam di Bengali Barat yang menyebar ke Kalkuta, dari serangan balas dendam tersebut menyebabkan 100 umat Muslim tewas, 438 orang luka-luka dan sebanyak 70 ribu umat Muslim menjadi tunawisma akibat penusukan, pemerkosaan, pengeroyokan dan pembakaran yang dilakukan oleh umat anti Muslim (Wirayudha, 2020).

Kerusuhan besar antara umat Hindu-Muslim juga terjadi di Gujarat pada September-Oktober berkisar tahun 1969-1971. Diawali dengan terjadinya sebuah perselisihan antara umat Hindu-Muslim, umat Hindu merasa dirugikan akibat membanjirnya imigran Muslim yang dianggap merebut pekerjaan mereka di pabrik-pabrik, setelahnya terjadilah kerusuhan diantara umat Hindu-Muslim. Kerusuhan antara umat Hindu-Muslim berupa pembunuhan, pembakaran, dan penjarahan terjadi pada 18 September 1971 sempat reda pada 26 September 1971, namun kembali membara dalam rentang 18-28 Oktober 1971, kerusuhan tersebut juga meluas ke kota-kota di Gujarat, seperti Ahamedabad, Vadodara, Mehsana, Nadiad, Anand dan Gondal.

Kerusuhan lainnya adalah yang terjadi di Desa Nellie, Assam, yang dikenal dengan “Pembantaian Nellie” pada 18 Februari 1983. Pembantaian tersebut bermula dari keputusan Perdana Menteri India Indira Gandhi yang memberikan hak suara dalam pemilu kepada enam juta imigran Muslim Bangladesh yang mengungsi di Desa Nellie. Keputusan Perdana Menteri Indira Gandhi ditentang oleh organisasi pemuda Hindu All Assam Students Union dan All Assam Gana Sangram Parishad.

Kedua organisasi tersebut selanjutnya menyebarkan sentiment anti imigran Muslim dan respon oleh suku Tiwa (Lalung). Bersatunya kedua organisasi pemuda dan suku tiwa selanjutnya melakukan penyerangan ke Desa Nellie tempat menetap imigran Muslim, dalam penyerangan tersebut para kelompok penyerang tidak pandang bulu baik perempuan maupun anak-anak akan dihabisi semuanya, selain itu mereka merusak rumah dan tanah milik imigran Muslim, akibat pembantaian tersebut menyebabkan sebanyak 2.191 jiwa melayang, bahkan beberapa sumber tidak resmi menyatakan korban jiwa mencapai 10 ribu jiwa, dan mencatatkan Pembantaian Nellie sebagai genosida terburuk sejak perang dunia ke-II (Wirayudha, 2020).

Pada fase transisi dari India baru merdeka menjadi India yang lebih maju terdapat berbagaimacam permasalahan yang dihadapi (Dzulfaroh&Hardiyanto, 2019). Permasalahan awal yang harus dihadapi adalah pembagian asset akibat pemisahan british India menjadi Pakistan dan India. Terbentuknya Pakistan sebagai tempat mayoritas Muslim dan India untuk menetap mayoritas Hindu menciptakan permasalahan yang besar, dimana baik umat Muslim dan Hindu harus bermigrasi secara bersamaan untuk bisa menempati negara yang telah ditentukan untuk mereka. Migrasi yang dilakukan secara bersamaan tersebut menimbulkan kerusuhan diantara kelompok umat Muslim dan Hindu, bahkan akibat migrasi massal tersebut menyebabkan timbulnya kekerasan komunal hingga menyulut terjadinya pembantaian diantara kedua kelompok yang berakhir dengan banyaknya korban baik yang harus diungsikan ataupun tewas terbunuh. Dari peristiwa migrasi massal tersebut sudah mulai terlihat benih-benih permusuhan diantara umat Muslim dan Hindu di India. Umat Muslim yang merasa nyaman tinggal di Pakistan yang mayoritas umatnya beragama Islam dipandang buruk oleh umat Hindu di India dengan

menggagap umat Muslim tidak setia terhadap India dengan berdirinya negara Pakistan (toppr, n.d).

Kolonialisme Inggris di India sejak pra-kemerdekaan hingga pasca-kemerdekaan. Penafsiran tradisional berpendapat bahwa masa lalu kolonial India berperan penting dalam pengakuan identitas Muslim, yang dengan hal tersebut mengakibatkan pemisahan India Britania pada tahun 1947. Menurut penelitian sarjana Francis Robinson, struktur kolonial India memicu permusuhan antara umat Hindu dan Muslim, hal tersebut disebabkan karena minoritas Muslim di Britis India menghendaki wilayah demografi dengan identitas politik terpisah dari Inggris dan Hindu. Kebijakan kolonialisme Inggris di India seperti kebijakan *divide at impera* (memecah belah dan memerintah) secara tidak langsung memberikan ruang untuk terbentuknya identitas politik Muslim. Darisini dapat difahami bahwa penjajahan Inggris di India tidak hanya berdampak kerugian materi dan banyaknya masyarakat yang menjadi korban, namun lebih dari itu, kebijakan Pemerintahan Inggris menimbulkan perpecahan agama dan politik, serta diikuti dengan timbulnya permusuhan diantara komunitas-komunitasnya yang berujung dengan pemisahan India pada tahun 1947.

Permusuhan antara umat Hindu dan Muslim juga terjadi akibat umat Muslim merasa diabaikan dan terancam di India. Disamping hal tersebut, adanya tekanan dari Liga Muslim yang diketuai oleh Mohammed Ali Jinnah untuk pembentukan Pakistan semakin memperkeruh hubungan antara umat Hindu dan Muslim. Pemisahan India-Pakistan memiliki dampak besar berupa hubungan Hindu-Muslim yang semakin memburuk, kekerasan yang semakin meluas di India, serta berpengaruh terhadap identitas Asia Selatan. Dalam penelitian seorang sarjana

Jennifer Yusin menjelaskan bahwa partisi yang terjadi membenarkan perbedaan Hindu-Muslim hingga mengakibatkan kekerasan massal, Vinodh Jairath seorang peneliti komunitas Muslim menambahkan, bahwa konflik Hindu-Muslim yang terjadi melekat erat dengan kebijakan Inggris yang memberlakukan kategorisasi dan klasifikasi hingga menyebabkan kegelisahan dan permusuhan antara umat Muslim dan Hindu.

Peggy Froerer seorang sarjana yang menekankan pengaruh organisasi Rashtriya Swayamsevak Sangh yang memiliki andil dalam perpecahan hubungan Hindu-Muslim yaitu dengan mengisolasi minoritas Muslim. Froerer juga mengemukakan bagaimana nasionalisme Hindu dan kurangnya perhatian akan etnografis memiliki dampak terhadap kelompok minoritas Muslim. Selain itu Froerer juga menyampaikan akan penting untuk memperhatikan badan penguasa India saat ini yaitu Bharatiya Janata Party (BJP). Froerer juga tidak lupa menyinggung tentang Hindutva yang berkaitan dengan identitas agama dan nasionalis seorang Hindu, melihat India merupakan tempat masyarakat beragam agama tentu Hindutva akan menimbulkan gesekan dimasyarakat (Ahmed, 2021).

2.2 Hindutva dan pokok pemikirannya & Pandangan Pemerintahan Narendra Modi terhadap Islam di India

Pada bagian ini akan dijelaskan dan dipaparkan apa itu Hindutva dan juga pokok pemikirannya dan juga Bagaimana pandangan Pemerintahan Narendra Modi terhadap Islam di India.

2.2.1 Hindutva dan Pokok Pemikirannya

Hindutva merupakan ideologi yang digagas oleh Vinayak Damodar Savarkar.

Hindutva berasal dari gabungan dua kata yaitu “Hindu” dan Bahasa Sansekerta “tattva” (itu atau esensi) Hindutva memiliki arti yaitu “ke-Hindu-an”. Umat Hindu memahami Hindutva sebagai sebuah gagasan dan tata cara menjalani kehidupan sesuai ajaran Hindu atau merupakan kiat-kiat menjadi Hindu (Sukla, 2021). Dahulu masyarakat India memegang identitas keagamaan ganda, namun akibat adanya bahaya dari operasi sensus yang dilakukan Inggris yang berpotensi menghilangkan tradisi keagamaan India, maka masyarakat India mencari solusi untuk mempertahankan identitas keagamaan ganda ini. Masyarakat India saat itu lebih memilih solusi dengan cara ideologis daripada melakukan penyerangan langsung ke Inggris. Cara ideologis yang dilakukan masyarakat India saat itu adalah dengan membuat pembedaan antara agama dan budaya sebagaimana yang diterapkan di barat. Kata “Hindutva” diciptakan untuk merujuk kepada “Hinduisme” bukan sebagai agama namun sebagai budaya. Melalui Hindutva keempat agama yang dianggap berbeda oleh sensus Inggris yaitu Budha, Hinduisme, Jainisme dan Sikhisme memiliki budaya yang sama. Hindutva hadir sebagai budaya pemersatu mewakili keempat agama tadi karena keempat agama tersebut memiliki kesamaan gagasan tentang karma dan dharma, pemujaan terhadap sapi, dan tempat ibadah yang berada di India, dengan kata lain Hindutva milik semua orang yang menganggap India sebagai tanah kelahiran mereka dan kelahiran agama mereka (Sharma, 2020)

Hindutva memiliki kesamaan dengan Nazi yang berkembang di Jerman, Hindutva merupakan ideologi yang memiliki tujuan untuk membentuk India menjadi negara Hindu, kemudian dari ideologi Hindutva terbentuk dan lahir kelompok ekstrimis Hindu di India. Hindutva hidup dan tumbuh berkembang di

India hingga kemudian banyak organisasi ekstrimis sayap kanan memegang teguh ideologi ini. Organisasi sayap kanan yang mempercayai dan memegang teguh Hindutva diantaranya Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), Visva Hindu Parishad (VHP), Bharatiya Janata Party (BJP), dan organisasi kolektif bersama bernama Sangh Parivar. Dalam Hindutva para penganutnya memegang tiga hal penting yaitu kebangsaan yang sama (Rasthra), ras yang sama (Jati), dan budaya atau peradaban yang sama (Sanskriti), disamping itu dikalangan masyarakat India Hindutva dianggap sebagai ideologi Fasis dan ada juga yang menganggap bahwa Hindutva termasuk ideologi Separatis (Kumparan, 2023).

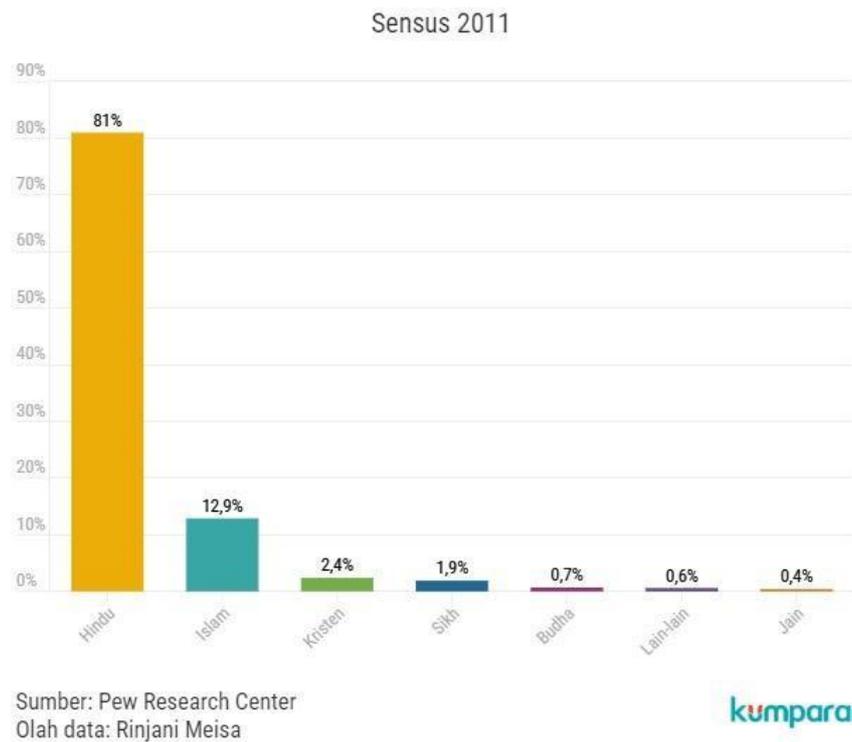
Hindutva sebagai ideologi sangat besar pengaruhnya dalam mendoktrin para pemeluknya. Hindutva menanamkan rasa nasionalis Hindu yang kuat untuk dijaga dan dipegang dan mereka yang melakukan hal tersebut menjadi bagian dari kelompok ekstrimis Hindu. Kelompok ekstrimis Hindu yang memegang erat nilai-nilai kehinduan memandang bahwa India merupakan tempat menetap umat Hindu saja dan hanya umat Hindu yang memiliki derajat tertinggi. Pola fikir dan cara pandang pemeluk Hindutva sangat berbahaya karena menilai dan menganggap umat agama lain selain umat Hindu merupakan masyarakat rendahan, sehingga dapat mendorong mereka untuk melakukan penyerangan dan pengusiran terhadap umat Beragama lainnya selain umat Hindu dan juga menjadi ancaman global untuk kebebasan, kesetaraan dan demokrasi di India (Krishnan, 2022; Sukla, 2021).

Hindutva sebagai ideologi memiliki sejarah yang dirangkai sendiri dan menjadi kebanggaan para pemeluknya. Hindutva menjelaskan bahwa umat Hindu merupakan masyarakat asli India, dahulu umat Hindu mengembangkan peradaban besar di India, namun semua itu musnah setelah kedatangan kekuatan asing,

kemudian membangun pemerintahan, dan kedua kekuatan tersebut adalah Islam dan Kristen yang selanjutnya berkuasa sekitar tahun 1200-1947. Sejarah rangkaian Hindutva menggambarkan bahwa umat Muslim dan Kristen yang merupakan minoritas yang mendominasi umat Hindu yang merupakan mayoritas, dan pada masa India modern saat ini Hindutva menegaskan mengajak umat Hindu untuk menunjukkan kekuatan mereka sebagai mayoritas.

Hindutva mudah disebarkan dan diterapkan di India karena saat ini umat mayoritas dipegang oleh umat Hindu. Umat Hindu saat ini unggul dengan jumlah persentase sebanyak 81 persen berbanding dengan umat Muslim yang berjumlah 12,9 persen. Melihat pertumbuhan umat Hindu dan umat Muslim yang pesat *Pew Research Center* memperkirakan nantinya ditahun 2050 umat Muslim akan mengalami penambahan menjadi 311 juta umat dan umat Hindu sebanyak 1,3 miliar umat.

Grafik 2. JUMLAH POPULASI AGAMA DI INDIA



Kelompok ekstrimis Hindu dengan ideologi Hindutva merupakan sebuah masalah dan ancaman besar bagi umat Muslim di India. Hal tersebut dibuktikan setelah kemerdekaan India, kelompok nasionalis Hindu yang berkeinginan memperkuat posisinya mulai melakukan kekerasan terhadap umat Muslim serta ekspansi besar-besaran dengan merebut situs milik umat Muslim di India. Masjid Babri yang dibangun pada tahun 1527 oleh Raja Mughal pertama yaitu Babur yang terletak di Uttar Pradesh, India, menjadi bangunan situs umat Muslim yang terkena imbas ekspansi yang dilakukan oleh kelompok nasionalis Hindu. Pada tahun 1992, sebanyak 150 orang nasionalis hindu mengancurkan Masjid Babri, hingga

kemudian memicu gelombang konflik yang menyebabkan ribuan orang merenggut nyawa (Yunariono, 2023).

Pembahasan tentang Hindutva identik kaitannya dengan proyek yang bertujuan menjadikan negara India dan negara bagian India menjadi negara Hindu (Hindu Rashtra). Hindutva merupakan ideologi yang dipercaya oleh berbagai kelompok seperti kelompok pinggiran paramiliter yang melakukan kekerasan, hingga organisasi yang mendukung pemulihan budaya Hindu. Sejak kemerdekaan India pada tahun 1947, Hindutva telah berperan penting dalam pembangunan bangsa dan pembangunan identitas mayoritas di India. Para pelaku Hindutva memandang kekerasan sebagai cara yang sah untuk mencapai klaim teritorial etnonasional, dan negara terkadang menggunakan cara-cara kekerasan. Namun, Hindutva baru benar-benar berhasil menjadi fenomena arus utama pada tahun 2014 dengan terpilihnya perdana menteri India saat ini, Narendra Modi.

Dibawah pemerintahan Narendra Modi, secara perlahan tapi pasti mulai muncul penyingkiran terhadap umat agama lain selain umat Hindu, dalam menjalankan siasatnya Narendra Modi mengarahkan agar umat Hindu dianggap sebagai orang dalam dan sebaliknya umat agama lain, terkhusus umat Muslim dianggap sebagai orang luar, dengan berkurangnya perhatian terhadap umat beragama lainnya selain umat Hindu, maka dengan mudahnya Narendra Modi untuk menetapkan Hindutva sebagai nasionalisme India. Hindutva merupakan ideologi yang berupaya menciptakan negara yang etnonasionalis. Hindutva tidak berfokus pada agama, namun keberadaan agama untuk dipolitisasi sehingga nantinya akan menumbuhkan rasa sebagai seorang Hindu yang memiliki identitas etnonasionalis.

Hindutva menawarkan wawasan mengenai ekspresi alternatif etnonasionalisme, otoritarianisme, dan chauvinisme yang dapat menawarkan perspektif baru mengenai ekstrimisme sayap kanan sebagai fenomena global. Hindutva pertamakali muncul sebagai gerakan perlawanan terhadap kolonialisme Inggris. Dalam Hindutva, representasi 'rakyat' merupakan hal yang penting dalam hubungan antara kepemilikan dan komunitas yang dibayangkan. Hindutva hadir yang mengadopsi masa-masa keemasan dimasa lampau sebelum berkuasanya kerajaan Mughal dan kerajaan Inggris, dari pada itu untuk mengenang masa keemasan tersebut Hindutva menulis ulang historiografi yang berlawanan akan rasa malu dan invasi asing akan kedigdayaan kerajaan Mughal dan kerajaan Inggris (Leidig, 2020).

2.2.2 Pandangan Pemerintahan Narendra Modi Terhadap Islam di India

India merupakan negara sekuler yang menjadi tempat bagi masyarakat dengan beragam agama. Masyarakat beragam agama tersebut diantaranya beragama Hindu, Islam, Kristen, Jain, Parsi dan Budha. Masyarakat India hidup berdampingan dan menjunjung tinggi toleransi sesama sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan bersama untuk sesama masyarakat India (Sahgal, 2021). Hubungan antara masyarakat India yang dahulu berjalan dengan baik secara perlahan berubah setelah di pimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Perdana Menteri Narendra modi merupakan individu yang berlatar belakang Hindu dan juga berasal dari partai nasionalis Hindu yaitu Bhartiya Janata party (BJP) sehingga sudah tidak asing jika segala kebijakan yang dilakukannya akan menempatkan umat Hindu sebagai prioritasnya (Krishnan, 2022).

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi diskriminasi terhadap kelompok minoritas khususnya terhadap umat Muslim sudah terlihat, hal tersebut dibuktikan dengan diresmikannya UU Amandemen Kewarganegaraan India 2019. UU Amandement Kewarganegaraan India 2019 merupakan UU Kewarganegaraan baru yang menggantikan UU kewarganegaraan India 1955 yang lama. Terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara UU Kewarganegaraan India 1955 dan UU Kewaraganegaraan India 2019 yang baru. Pada UU Kewarganegaraan India 1955 yang lama menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kewarganegaraan India cukup dengan dua hal yang mendasari yaitu berasal dari India (lahir dan keturunan), kemudian tinggal dalam waktu lama dan berkelanjutan di India, hal yang menjadi garis besar dari UU Kewarganegaraan 1955 yang lama adalah tidak menjadikan perkara agama menjadi dasar untuk mendapatkan kewarganegaraan sedangkan pada UU Kewarganegaraan yang baru menjadikan dasar agama sebagai syarat untuk mendapatkan Kewarganegaraan (Guha, 2019). UU Amandement kewarganegaraan 2019 memiliki fokus yaitu mempercepat permohonan kewarganegaraan bagi para imigran Hindu, Sikh, Jain, Parsi, Budha, dan Kristen yang melarikan diri ke India karena diskriminasi yang didapatkan di negara Afghanistan, Pakistan dan Bangladesh, melalui UU Amandement Kewarganegaraan ini para imigran tersebut akan mendapatkan kewarganegaraan lebih mudah yaitu cukup menetap di India selama lima tahun.

RUU Amandemen Warga Negara pertama kali diajukan ke parlemen pada Juli 2016. Amandemen Warga Negara tersebut selanjutnya disetujui oleh majlis rendah yang saat itu mayoritasnya merupakan anggota BJP. Pengesahan majlis rendah terhadap Amandemen Warga negara tidak disetujui oleh majlis tinggi

karena pertimbangan setelah adanya protes anti migran bersamaan dengan kekerasan didalamnya yang terjadi di Timur laut India. Keberpihakan Amandemen Warga Negara terhadap umat nonmuslim terlihat jelas karena berkaitan dengan Daftar Warga Negara Nasional (NRC). Daftar Warga Negara Nasional (NRC) merupakan daftar orang-orang yang telah terdaftar dan dapat membuktikan bahwa mereka telah datang ke negara bagian pada tanggal 24 Maret 1971 sehari sebelum negara tetangga Bangladesh menjadi negara merdeka. Keterkaitan antara Amandemen Warga Negara dan Daftar Warga Negara Nasional (NRC) adalah warga India yang tidak terdaftar dalam NRC maka akan berpotensi terkena deportasi dan interniran, oleh karena itu jika ada warga negara, khususnya dalam hal ini yang mendapat perlakuan khusus adalah umat Hindu, tidak terdaftar dalam NRC, mereka tetap akan aman dan selamat dalam perlindungan Amandemen Warga Negara yang menjadikan mereka tetap dapat menetap di India (BBC, n.d.)

Permasalahan lainnya yang memiliki keterkaitan diantara umat Muslim dan Hindu serta Perdana Menteri Narendra Modi adalah berkaitan dengan wilayah Kashmir. Permasalahan Kashmir adalah pada saat wilayah dengan mayoritas umat Muslim tersebut diperkirakan akan bergabung dengan Pakistan, hingga kemudian penguasa wilayah tersebut menghendaki Kashmir berdiri sendiri secara merdeka, namun secara tiba-tiba penguasa wilayah tersebut memilih untuk membawa Kashmir bergabung dengan India. Hal tersebut menyebabkan Pakistan seakan dikhianati dan India merasa bahwa Kashmir adalah milik India sepenuhnya, oleh karena itu terjadi persetujuan diantara Pakistan dan India yang berusaha mengklaim bahwa Kashmir adalah wilayah miliknya sepenuhnya (INDONESIA, 2019).

Pasal 370 yang disahkan pada bulan Oktober 1949 berisikan sebuah ketentuan yang menjelaskan bahwa Kashmir memiliki kebebasan dalam mengatur otonomi internal dengan hal tersebut menjadikan Kashmir mampu membuat Undang-Undang (UU) sendiri dalam segala hal, terkecuali untuk beberapa sektor seperti keuangan, pertahanan, urusan luar Negri dan Komunikasi, selain itu pasal 370 juga menjelaskan bahwa Kashmir menghendaki konstitusi terpisah dan bendera terpisah serta menolak hak kepemilikan orang luar diwilayah tersebut (Aljazeera, 2023). Pasal 370 yang sudah ada diperkuat dengan adanya pasal 35A yang menjadi bagian dari pasal 370 pada tahun 1954. Pasal 35A menjelaskan dan menegaskan wewenang para pembuat Undang-Undang negara bagian akan terjaminnya hak-hak khusus dan hak istimewa penduduk tetap di Kashmir.

Pemberlakuan pencabutan pasal 370 Kasmir oleh pemerintah India menyebabkan secara instan pasal 35A juga terhapus. Hilangnya pasal 35A berpotensi menyebabkan terbukannya akses untuk masyarakat non Kasmir membeli property dari wilayah tersebut, bahkan bukan tidak mungkin, masyarakat non Kashmir yang mayoritas merupakan umat Hindu akan menetap permanen di Kashmir, bertahap memenuhi Kashmir dan menyebabkan umat Muslim sebagai masyarakat mayoritas di Kashmir terusir, atau secara tidak langsung lewat dengan terhapusnya pasal 35A pemerintah India sedang berencana melakukan “pergeseran demografis” wilayah mayoritas Muslim.

Pada tahun 2019 bersamaan dengan dilakukannya pencabutan 370 atas Kashmir, Pemerintahan India dibawah kendali Narendra Modi membagi wilayah Kashmir menjadi dua wilayah, yaitu Jammu dan Kashmir dibarat dan Ladakh di Timur, kedua wilayah tersebut nantinya akan diperintah langsung dari New Delhi,

dampak yang muncul akibat pembagian wilayah tersebut adalah Kashmir kehilangan bendera negaranya bersamaan dengan itu juga kehilangan hukum pidana dan konstitusinya yang tertuang dalam pasal 370. Setelah pembagian dua wilayah baru tersebut, saat itu tidak terdapat pemilihan umum daerah yang dilaksanakan, namun Mahkamah Agung memerintahkan untuk mengadakan pemilihan legislatif lokal di wilayah Kashmir yang dikuasai India pada 31 Oktober 2019 (Aljazeera, 2023).

Permasalahan di Kashmir berdampak terhadap kehidupan umat Hindu dan Muslim di India. Pada wilayah Kashmir yang dikuasai India, umat Hindu didalamnya yang merupakan minoritas menjadi target pembunuhan oleh kelompok militan. Dalam rentang waktu tiga bulan para militan dari berbagai kelompok telah membunuh enam umat Hindu, beberapa diantaranya para militan berhasil melukai dan membunuh seorang apoteker Hindu diluar rumahnya pada 4 April di distrik Shopian, Kashmir Selatan, kemudian seorang supir Hindu juga berhasil dibunuh pada 13 April dirumahnya di distrik Selatan, tepatnya di Kulgam, selanjutnya pembunuhan juga terjadi pada 12 Mei terhadap seorang Pandit Kashmir didalam kantornya di Departement Pendapatan Pemerintah, yang terletak di distrik Budgam, selanjutnya pada 2 Juni seorang pria bersenjata bertopeng melakukan penyerangan ke sebuah bank di distrik Kulgam, yang dari sana menyebabkan tewasnya seorang karyawan beragama Hindu, dan terakhir tiga orang umat Hindu, yang diantaranya guru sekolah dan seorang buruh migran juga tewas dibunuh oleh militan (reliefweb, 2022).

Aneksasi dan pengambilan wilayah Kashmir oleh India memberikan dampak yang besar. Seorang mantan perwira Angkatan Udara India (IAF), yang juga

mewakili komunitas Kashmiri Pandit (Hindu), Kapil Kak berpendapat bahwa langkah yang dilakukan oleh India telah meningkatkan keterasingan, keputusan, dan ketakutan di wilayah itu. Marsekal Kak menambahkan “Warga Kashmir sekarang merasa terasingkan dari daerah lain di negara itu, karena harapan mereka telah hancur dan ketidakpercayaan ini telah menyebabkan teror,” ujarnya. (Nursalikhah, 2020). Aneksasi wilayah Kashmir juga berdampak terhadap hubungan antara Pandit Kashmir (Hindu) dan Muslim. Saat militansi Kashmir terjadi kurun waktu 1989-1990 banyak dari Pandit Kashmir berpisah dengan umat Muslim, mereka Pandit Kashmir pergi meninggalkan rumah untuk menuju dan menetap di Jammu yang berjarak 300 kilometer (186 mil) yang merupakan tempat mayoritas umat Hindu. Marsekal Kak menambahkan “Eksodus Kashmir Pandit adalah yang paling menyakitkan. Tidak pernah ada bentrokan antara kedua komunitas tersebut sejak abad ke-7 ketika Islam masuk ke wilayah tersebut. Meskipun eksodus tahun 1990, ada ikatan. Tapi aneksasi pemerintah sejak tahun lalu telah menciptakan suasana ketakutan di antara penduduk Kashmir dan ikatan kebersamaan antara Kashmiri Pandit dan Muslim (saat ini) hampir musnah,” ucapnya (Nursalikhah, 2020).

Kebijakan Pemerintah India mengeluarkan Undang-Undang untuk menghapuskan perlindungan konstitusional yang memberikan jaminan tempat tinggal dan pekerjaan telah membuat masyarakat Kashmir khawatir dan takut karena hal demikian akan memudahkan orang-orang dari luar Kashmir untuk menetap secara permanen dan secara perlahan mengusir mereka dari Kashmir. Pemberlakuan kebijakan baru tersebut menyebabkan umat Muslim dan militan Kashmir bespekulasi adanya keterlibatan Pandit Kashmir yang merupakan umat Hindu ditempatkan di department pemerintahan regional untuk menjalankan Undang-Undang kebijakan

baru tersebut, sehingga mereka dianggap sebagai agen negara nasionalis Hindu oleh umat Muslim dan militan Kashmir.

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan secara sepihak oleh Pemerintah India terhadap negara bagian Kashmir seperti penyingkiran dewan regional Kashmir, penghapusan otonomi parsial, penurunan status administratif serta pembagian wilayah Kashmir menjadi dua wilayah yaitu Jammu dan Kashmir dan Ladakh dan menempatkan keduanya langsung dibawah pemerintahan pusat serta pemberian fasilitas sebuah portal online untuk Pandit Kashmir yang digunakan untuk mengklaim tempat tinggal umat Muslim merupakan milik mereka. Pemerintahan BJP meremehkan dan tidak peduli akan kebijakan-kebijakan sepihak yang diterapkan di Kashmir, sehingga tanpa disadari hal tersebut berdampak terhadap umat Hindu yang merupakan minoritas di Kashmir yang mendapatkan serangan dari umat Muslim dan Militan Kashmir.

Penyerangan militan yang didukung oleh umat Muslim Kashmir menargetkan umat Hindu secara bertahap. Serangan dimulai pada 31 Desember 2020 dengan melakukan penembakan terhadap seorang umat Hindu di Srinagar. Dalam kasus penyerangan tersebut Front Perlawanan yang merupakan kelompok baru yang terbentuk setelah perubahan status Kashmir pada 2019 mengaku merupakan pelaku dari penembakan tersebut. Kelompok Front Perlawanan menganggap korban yang ditembak merupakan anggota agen Rashtriya Swayamsevak Sangh yang menyamar menjadi pengusaha dan juga ikut andil aktif dalam proyek perubahan demografi dan koloni pemukim yang digerakkan oleh fasis Hindutva demi mengubah sistem pemerintahan. Kelompok militan lainnya juga melakukan penembakan terhadap seorang bangkir Rajastani yang dieksekusi pada 2 Juni di Kulgam. Penyerangan

kelompok militan yang ditargetkan khusus kepada warga sipil dan kelompok minoritas Hindu adalah karena minimnya senjata yang mereka miliki sehingga mereka menargetkan korban yang mudah untuk diserang dan dilumpuhkan.

Ketegangan antara umat Muslim dan Kashmiri Pandit juga terjadi pada saat peluncuran sebuah film berjudul *The Kashmir Files*. Film berjudul *The Kashmir files* merupakan film dokumenter berdasarkan kisah nyata di India tentang bagaimana kondisi eksodus minoritas Hindu Kashmir, atau juga dikenal dengan Pandit Kashmir yang berjuang menyelamatkan diri, hingga memutuskan untuk meninggalkan Kashmir ditahun 1990-an karena adanya penganiayaan dan pengancaman dari kelompok Islam radikal (Zulfajjah, 2022). Film ini mendapat pujian dari Perdana Menteri Narendra Modi, serta beberapa menterinya, dan pemerintah negara bagian yang dikuasai BJP di seluruh negeri juga ikut mempromosikannya dengan menghapuskan pajak hiburan atas distribusinya dan, dalam beberapa kasus, memberikan libur kepada pegawai pemerintah untuk menontonnya. Pendukung film ini berpendapat bahwa film tersebut hanya mengungkap kisah tragis Kashmiri Pandits, yang sering diabaikan dalam narasi konflik, namun para kritikus menyebutnya sebagai propaganda Islamofobia dan berpendapat bahwa film tersebut berupaya mengobarkan kebencian terhadap Muslim, intelektual liberal, aktivis, dan semua pihak. Bagaimanapun juga, promosi film tersebut oleh BJP telah membuat para Pandit Kashmir yang tinggal di Kashmir menjadi lebih rentan karena memicu ketegangan antarkomunitas dan menempatkan mereka dalam sorotan (reliefweb, 2022).

BAB III
ANALISIS PERBEDAAN TUJUAN
PENYEBAB TERJADINYA KOMPETISI POLITIK DAN KONFLIK
BERKEPANJANGAN DAN KONSEKUENSINYA
TERHADAP HUBUNGAN MUSLIM DAN HINDU DI INDIA

Pada bab ini peneliti akan membahas dan menjelaskan tentang perbedaan tujuan diantara umat Muslim dan Hindu di India, hingga kemudian perbedaan tujuan tersebut menyebabkan munculnya kompetisi politik diantara kedua umat beragama yang menghasilkan konflik berkepanjangan yang berdampak terhadap hubungan umat Muslim dan Hindu di India. Dalam menjelaskan bab ini peneliti menggunakan *Realistic Conflic Theory* atau teori Konflik Realistis oleh Saul Mc Leod. Penggunaan teori Konflik Realistis dinilai cocok karena mampu menjawab rumusan masalah dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya konflik diantara umat Muslim dan Hindu di India.

Saul Mc Leod melalui teori konflik realistis menjelaskan secara bertahap penyebab terjadinya konflik dimulai dari perbedaan tujuan yang dimiliki oleh setiap individu dari masing-masing kelompok, kemudian perbedaan tujuan tersebut menciptakan persaingan/kompetisi antarindividu dari masing-masing kelompok, hingga selanjutnya rasa tidak ingin kalah dan ingin menjadi pemenang tersebut tanpa disadari menciptakan konflik antarindividu tersebut dan mengurangi rasa solidaritas diantara mereka yang sejatinya satukesatuan, permasalahan yang terjadi diantara individu kelompok dari kompetisi dan konflik secara perlahan akan menarik kesatuan yang lebih kuat untuk saling bersaing dan berkompetisi hingga terjadinya kompetisi antar kelompok yang diakhiri dengan konflik yang terjadi diantara kelompok-kelompok tersebut.

Sebagai upaya menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan bagian ini yang terbagi menjadi dua sub bab. Pertama yaitu Perbedaan tujuan&kompetisi politik diantara umat Muslim dan Hindu pada era Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi. Kedua yaitu konflik berkepanjangan dan konsekuensi konflik terhadap hubungan umat Muslim dan Hindu di India.

3.1. Perbedaan Tujuan antara Kelompok Hindu-Muslim di India

Prashant Waikar (2018) dalam artikelnya yang berjudul Reading Islamophobia in Hindutva: an Analysis of Narendra Modi's Political Discourse menjelaskan tentang rencana Narendra Modi berkaitan dengan Islamophobia atau antagonisme diantara Hindu dan Muslim. Analisis terhadap naskah-naskah pidato, wawancara dan podcast, Waikar berkesimpulan bahwa Narendra Modi setelah menjadi Perdana Menteri India tetap merencanakan Hindutva yang menempatkan umat Muslim sebagai subordinat umat Hindu. Narendra Modi yang saat itu menjabat sebagai ketua Menteri Negara Bagian Gujarat menggunakan kekuasaannya untuk mendukung nasionalis Hindu melakukan kerusuhan dan kekerasan terhadap umat Muslim di India (Sajjad M. W., 2018).

Asaduddin Owaishi mengkritik Perdana Menteri India Narendra Modi dan Partainya Bharatiya Janata Party (BJP) yang mayoritas beragama Hindu atas tindakan telah mengasingkan 200 juta umat Muslim, bukan hanya itu Asaduddin Owaishi juga menyatakan bahwa kehadirannya dalam politik India adalah bertujuan untuk mengguncang keseimbangan politik dan mengubah pandangan yang menganggap remeh umat Islam (Shankar, 2021). Asaduddin Owaishi sebagai pemimpin partai All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) memiliki harapan pada pemilu musim Semi untuk dapat memperluas partainya sampai ke

seluruh negeri dengan tujuan agar umat Islam memiliki suara lebih besar. Keberadaan Asaduddin Owaishi sangat penting bagi umat Muslim di India, bahkan ia dianggap sebagai benteng yang melindungi umat Muslim. Keberanian Asaduddin Owaishi dalam menyampaikan kemarahannya di parlemen serta pantang mundur menghadapi penggemar Perdana Menteri Narendra Modi, bukan hanya itu Asaduddin Owaishi juga berani menentang sesuatu yang salah dengan merobek Salinan CAA serta mengomandoi pengikutnya dalam demonstrasi anti-CAA di Hyderabad.

Hubungan Hindu-Muslim di India berjalan tidak baik karena umat Hindu yang di pimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi terkesan menggurui dan melangkahi batasan-batasan yang seharusnya tidak dilakukan karena akan membahayakan umat Muslim. Seperti yang dilakukan oleh Perdana Menteri Narendra Modi dibantu oleh BJP yang memutuskan mengesahkan Undang-Undang yang bertujuan untuk menyatukan Undang-Undang pribadi lintas agama. Undang-Undang gabungan semua Undang-Undang pribadi lintas agama telah resmi disahkan dinegara bagian Uttarkhand di Himalaya. Undang-Undang tersebut bernama *Uniform Civil Code*. Dalam penerapannya *Uniform Civil Code* menetapkan sebuah aturan seperti usia minimum menikah bagi pria dan wanita, dimana hal tersebut berupaya untuk memberikan persamaan hak bagi laki-laki dan wanita dalam beberapa hal seperti perceraian, pembagian harta warisan, pemberian hak kepada anak angkat, anak yang lahir diluar nikah atau yang dikandung melalui kelahiran pengganti.

Umat Muslim yang memiliki hukum syariah sendiri tentu sangat keberatan dengan apa yang diputuskan oleh Perdana Menteri Narendra Modi dan BJP. Umat

Muslim menganggap partai nasionalis sayap kanan yang dipimpin Narendra Modi berupaya mendiskriminasi dengan melakukan agenda Hindu nya tersebut yang secara langsung tindakan tersebut telah mempermainkan keyakinan umat Muslim. Asaduddin Owaishi sebagai politisi Muslim Regional dari India Selatan beranggapan bahwa apa yang dilakuakn oleh Narendra Modi dan BJP hanya untuk menegaskan kode etik Hindu yang secara langsung hal tersebut membatasi umat Muslim untuk menjalankan agama dan budaya khasnya, bukan hanya itu, melalui peresmian *Uniform Civil Code* Narendra Modi dan BJP hendak menegaskan posisi mereka sebagai mayoritas dan penguasa, sedangkan umat Muslim hanya sebagai masyarakat kecil bawahan (Jain, 2024).

Anggota Parlemen All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) Asaduddin Owaishi menyampaikan sebuah pernyataan pedas terhadap Aliansi Pembangunan Inklusif Nasional India (INDIA). Asaduddin Owaish beranggapan penyebab INDIA tidak memberikannya ‘tiket’ karena kekhawatiran pihak INDIA jika mendukungnya maka berpotensi tidak akan mendapatkan suara dukungan dari umat Hindu. Asaduddin Owaishi menyampaikan ketidak setujuannya terhadap larangan keikutsertaan umat Islam dalam pemilu, ia menyampaikan bahwa perlu sebuah perjuangan untuk dapat memenangkan pemilu terlepas bagaimana hasil akhirnya. Asaduddin Owaishi juga mengecam skenario politik di India. Asaduddin menganggap bahwa skenario politik yang berjalan selama kurang lebih tiga tahun setelah kemerdekaan, sejak berlakunya konstitusi India merupakan skenario politik sektarian yang dengan hal tersebut terkesan meminggirkan keikutsertaan poltisi Muslim di dalamnya (Biswas, 2023).

Konfrensi pers antara Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berlangsung di Gedung Putih membahas seputar HAM dan nilai-nilai demokrasi. Dalam konfrensi pers tersebut Presiden India Narendra Modi mendapatkan pertanyaan “Langkah apa saja yang akan diambil untuk meningkatkan hak-hak Muslim dan minoritas lainnya dinegara anda dan untuk menegakkan kebebasan berbicara, “Modi mengatakan langkah-langkah itu tidak perlu diperbaiki. Narendra Modi juga menambahkan bahwa tidak ada diskriminasi yang terjadi selama masa pemerintahannya, walaupun demikian kelompok hak asasi manusia (HAM) dan lapaoran pelanggaran Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menunjukkan bukti adanya diskriminasi yang terjadi.

Perdana Menteri Narendra Modi juga berkata "Konstitusi kami dan pemerintah kami, dan kami membuktikan bahwa demokrasi dapat memberikan (hak-hak agama minoritas). Ketika saya mengatakan memberikan - kasta, kepercayaan, agama, jenis kelamin, tidak ada ruang untuk diskriminasi (dalam pemerintahan saya)," kata Modi kepada wartawan. (VOA, 2023). Dalam laporan HAM dan kebebasan beragama, ungkapan keprihatinan diutarakan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat atas tindakan pemerintahan India terhadap umat agama minoritas seperti Muslim, Hindu Dalit, Kristen dan agama minoritas lainnya, laporan tersebut juga menjelaskan kekerasan yang dilakukan pemerintah India terhadap jurnalis. (Ahmed, 2021)

Dalam sesi konfrensi pers Narendra Modi menerangkan bahwa kebijakan pemerintah India dapat diakses oleh semua pihak. Hal yang terjadi justru sebaliknya, kelompok HAM menerangkan bahwa para pembangkang, kelompok minoritas dan jurnalis senantiasa mendapat penyerangan. Dilain sisi kondisi Indeks

Kebebasan Pers India menurun tajam hal tersebut terpantau posisi awal Indeks Kebebasan Pers milik India menempati peringkat 140 pada 2014, berubah menjadi peringkat 161. Selain itu New Delhi juga tercatat sebagai negara yang menutup akses internet dalam lima tahun berturut-turut, hal tersebut menunjukkan bagaimana para jurnalis dan Pers benar-benar ditekan oleh pemerintah India agar tidak membuka keburukan India. Kondisi umat Muslim sama memprihatinkannya, bangunan dan tempat tinggal umat Muslim dihancurkan karena dianggap ilegal, serta adanya diskriminasi berupa larangan menggunakan hijab bagi para Muslimah saat di ruang kelas, hal tersebut terjadi di Karnataka pada saat BJP berkuasa (VOA, 2023).

3.2. Kompetisi Politik antara Hindu-Muslim di India

Bharatiya Janata Party (BJP) merupakan partai Hindu yang menopang kekuasaan Perdana Menteri Narendra Modi. BJP memiliki pengaruh besar terhadap partai-partai lainnya di India, karena BJP anti umat Muslim, maka partai-partai non Hindu akan dianggap bersahabat dengan umat Muslim dan hal tersebut menciptakan Islamofobia di India. Bharatiya Janata Party (BJP) merupakan partai politik nasionalis Hindu di India yang meyakini kesamaan antara Hinduisme dan identitas nasional India. India yang ditempati oleh mayoritas Hindu menyebabkan anggota BJP meyakini bahwa India adalah *Rashtra* (bangsa) Hindu dan budaya yang ada di India hanya budaya Hindu saja serta filosofi yang dipegang serta dijalankan yaitu *Hindutva* (ke-Hinduan) yang dikenal akan intoleransinya terhadap minoritas Muslim. BJP dianggap sebagai inkarnasi dari Bharatiya Jana Sangh (BJS) yang merupakan partai politik yang terbentuk setelah kemerdekaan, yang berlandaskan

gerakan revivalis Hindu yang akarnya mengerucut berasal dari kerajaan Inggris (Vaishnav, 2018).

Bharatiya Janata Party (BJP) selain sebagai partai nasionalis Hindu ternyata juga termasuk partai yang pro bisnis dibandingkan partai-parati lainnya di India. Keberadaan BJP menjadi payung yang menaungi kaum internasionalis, isolasionis, libertarian, dan nasionalis. BJP memiliki perbedaan dibanding partai-partai lain terdahulu, pertama BJP kental keterkaitannya dengan Hindutva, berbeda dengan partai-parati politik lainnya yang menganut faham sekuler, yang mempercayai bahwa tidak boleh ada parati politik yang lebih unggul dibandingkan yang lain. BJP yang menganut faham Hindutva berkeyakinan bahwa keberadaannya bertujuan melayani umat Hindu, selanjutnya BJP merupakan partai politik yang lebih mendukung kebijakan pro-bisnis, berbeda dengan partai politik lainnya yang lebih memilih sikap sosial demokrat yang lebih kiri-tengah.

Mayoritas partai tunggal BJP di Majelis rendah perlemen banyak terdapat perubahan sebelum akhirnya BJP berkuasa pada 2014. Pada kisaran tahun 1989 dan 2014 tidak ada satu partaipun yang mampu membentuk pemerintahan sendiri tanpa bantuan sekutu koalisi. Sebagian analis mempercayai bahwa politik koalisi akan tetap ada, sampai akhirnya BJP memenangi pemilu tahun 2014. Hasil pemilu tahun 2014 secara tidak langsung menandai perubahan pola kompetisi pemilu di India yang sudah berjalan selama seperempat abad. Keberadaan BJP sejatinya bukan hanya sekedar partai politik, lebih dari itu BJP merupakan ekspresi politik sebuah keluarga organisasi nasionalis Hindu yang dikenal dengan Sangh Parivar (Vaishnav, 2018).

All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) merupakan partai politik yang didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan kepentingan Nizam di Hyderabad serta untuk menentang integrasi Hyderabad. AIMIM didirikan pada 1927 berdirinya partai ini menentang integrasi Hyderabad dengan India setelah kemerdekaan serta menghendaki negara Muslim yang terpisah. AIMIM mengklaim merupakan partai politik yang memiliki tujuan untuk pembangunan sosial, ekonomi dan pendidikan serta keterwakilan andil umat Muslim, Dalit, minoritas lainnya, serta semua komunitas kurang mampu di India. Klaim yang dilakukan oleh AIMIM ternyata berbeda dengan sejarah dan struktur partai politiknya. Sejarah dan struktur AIMIM sebagai berikut merupakan partai politik yang didirikan pada tahun 1927 oleh Nawab Mehmood Nawaz Khan atas nasihat Nizam dari Hyderabad Nawab Mir Qosim Ali Khan dengan namanya saat itu Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (MIM).

Hadirnya Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (MIM) saat itu bertujuan untuk melindungi politik Nizam. Pada tahun 1928 Bahadur Yar Jung terpilih sebagai presiden MIM. Beberapa tahun kemudian tepatnya setelah kematian Bahadur Yar Jung pada 1944, seorang kepercayaan Nizam yaitu Qosim Rizvi terpilih menjadi pemimpin Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (MIM) selanjutnya. Lama berjalan tepatnya setelah kemerdekaan Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (MIM) dilarang dan Qosim Rizvi dipenjara. Setelahnya Qosim Rizvi dibebaskan dari penjara pada tahun 1958 dengan syarat harus pindah ke Pakistan. Sebelum keberangkatannya ke Pakistan Qosim Rizvi menyerahkan kendali partainya kepada pengacara Abdul Wahid Quraishi dan setelahnya dibentuk menjadi All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) dan Presiden AIMIM saat ini Asaduddin Owaishi adalah cucu

dari Abdul Wahid Quroishi serta sudah menjadi bagian sebagai anggota parlement Hyderabad dari 2004 yang sebelumnya ayahnya yang bernama Sultan Shalehuddin Owaishi juga menjadi anggota parlement Hyderabad dari 1984-2004 (Organizer, 2021).

3.3. Konflik Berkepanjangan antara Hindu-Muslim di India

Penerapan Undang-Undang Kewarganegaraan Baru atau Citizenship Amandement Act (CAA) berdampak buruk bagi kehidupan sosial di India. Umat Muslim merupakan kelompok yang menentang UU Kewarganegaraan baru tersebut karena berdampak buruk dan merugikan. Dilain sisi umat Hindu mendukung penerapan UU kewarganegaraan baru tersebut karena menguntungkan dan dinilai membantu umat Hindu lainnya yang mendapatkan diskriminasi di negara Bangladesh, Pakistan dan Afghanistan. Perseteruan antara demonstran pendukung CAA dan penolak CAA terkadang juga diperpanas oleh tokoh partai seperti yang dilakukan oleh Kapil Mishra, pemimpin partai penguasa Bharatiya Janata party (BJP). Dalam kondisi memanas akibat perseteruan demonstran pendukung dan penolak CAA, Kapil Mishra justru mengarahkan polisi untuk mensterilkan tempat untuk kunjungan Presiden Amerika Serikat, Donal Trump, selain itu Kapil Mishra juga memberikan orasi provokatif yang mengecam demonstran penolak CAA. Konflik yang berlangsung diperparah akibat personil kepolisian yang mundur dari pengamanan tempat terjadi nya konflik, seakan membiarkan demonstran Hindu membantai demonstran Muslim, akibat konflik tersebut menyebabkan 42 orang tewas, puluhan orang mengalami luka tembak dan ratusan orang perlu dirawat dirumah sakit (Kontras, 2020).

Bentrokan antara umat Hindu dan Muslim kembali terjadi di wilayah Nuh, di Negara bagian Haryana yang tidak jauh dari New Delhi pada Senin (31/07/2023). Bentrokan yang terjadi berawal dari prosesi keagamaan Hindu yang berangkat melewati wilayah Nuh dengan maksud untuk berpindah dari satu kuil ke kuil lainnya, wilayah Nuh sendiri merupakan wilayah yang ditempati oleh mayoritas Muslim hingga akhirnya bentrok antara umat Muslim dan Hindu terjadi. Akibatnya bentrok yang terjadi bahkan menjadikan bentrok antara umat Hindu dan Muslim tersebut meluas ke wilayah Gurugram. Dalam insiden bentrok antara umat Hindu dan Muslim menyebabkan masjid terbakar, terbunuhnya ulama dan banyak warga yang terluka, bentrokan yang terjadi menyebabkan dua orang tewas yang merupakan anggota penjaga rumah dan pasukan sukarelawan yang membantu polisi mengendalikan bentrokan yang terjadi serta terdapat 60 orang dan 10 personil kepolisian yang terluka akibat bentrokan massif yang terjadi tersebut. Ketua Menteri Haryana Manohar Lal Khattar menghimbau untuk pemberlakuan jam malam, pengnonaktifan internet dan penambahan personil keamanan (Indonesia C. , 2023).

Konflik umat Hindu dan Muslim kembali terjadi disebabkan terjadinya pemenggalan brutal terhadap seorang penjahit Hindu di Udaipur. Tragedi mengerikan tersebut bermula saat setelah 10 hari seorang penjahit Hindu bernama Kanhaiya Lal menyatakan dukungannya terhadap politikus partai BJP, Nupur Sharma, yang menghina Nabi Muhammad SAW dan setelahnya menjadi kontroversial, beberapa hari setelahnya datanglah dua orang ke toko milik Kanhaiya Lal yang menyamar menjadi pelanggan yang setelahnya kedua orang tersebut melancarkan aksi pembunuhan dan pemenggalan terhadap Kanhaiya Lal. Kejadian pemenggalan tersebut memicu kemarahan umat Hindu di India yang berencana untuk

melakukan pembalasan perlakuan kekerasan terhadap kedua pelaku dan Muslim lainnya. Dampak dari pembunuhan tersebut juga menyebabkan sebuah grup public telegram yang berdedikasi mempromosikan dan membela umat Hindu menyerukan agar umat Hindu mengambil senjata dan menyerang umat Muslim, grup tersebut juga berniat mendatangi kantor polisi untuk membunuh dan membalas dendam terhadap kedua pembunuh, tidak berhenti disitu, kelompok sayap kanan Hindu, Viswa Hindu Parishad menyerukan protes nasional di media sosial terhadap terorisme umat Muslim dan mereka mengeluhkan akan umat Muslim yang senantiasa mengganggu umat Hindu (Indonesia C. , 2022).

Kerusuhan Hindu-Muslim kembali terjadi di Delhi, kerusuhan bermula dari aksi protes umat Muslim yang memprotes Undang-Undang Amandement Kewarganegaraan yang anti Muslim. Aksi protes umat Muslim tersebut mendapatkan tantangan dari umat Hindu yang dibantu oleh para politisi Bharatiya Janata Party (BJP) yang mendukung kebijakan pemerintah India. UU Amandement Kewarganegaraan hadir untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas non Muslim yang mendapatkan diskriminasi dari tiga negara yaitu Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan. Melalui UU Amandement Kewarganegaraan kelompok minoritas non Muslim dipermudah untuk mendapatkan kewarganegaraan India yaitu hanya dengan tinggal di India selama enam tahun, namun yang menjadi permasalahan dari UU terbaru ini adalah tidak berlaku bagi minoritas Muslim dengan alasan bahwa umat Muslim merupakan mayoritas di ketiga negara tersebut (Wirayudha, 2019).

Pasca pencabutan pasal 370 terkait status istimewa Kashmir pada 5 Agustus 2019 (INDONESIA, 2019). India dan Pakistan terlibat konfrontasi militer di wilayah perbatasan. Konfrontasi militer tersebut terjadi akibat aksi bom mobil milisi Jaish-e-Mohammad pada 14 Februari 2019 yang menyebabkan tewasnya 40 tentara perbatasan India. Duabelas hari setelahnya India melakukan serangan balasan melalui udara ke baltok di wilayah Pakistan yang diduga menjadi sarang milisi sparatis Kashmir pelaku bom mobil. Selanjutnya Pakistan kembali melakukan serangan terhadap India menggunakan angkatan udara, hingga akhirnya menyebabkan pertempuran udara, hasil dari pertempuran udara itu pilot dari pesawat MiG-21 “Bison” tertembak jatuh dan pilotnya Abhinandan Varthaman ditahan dan baru dibebaskan pada 1 Maret 2019 (Wirayudha, 2019).

Pencabutan pasal 370 yang memberikan hak istimewa bagi Kashmir menjadi polemik yang menyebabkan kerusuhan. Masyarakat Kashmir yang tidak terima akan pencabutan status istimewa Kashmir melakukan pembontakan terhadap pemerintahan India, Pemerintahan India tidak tinggal diam, para aparat kepolisian membela langkah yang telah diambil oleh pemerintahan India, hingga akhirnya kerusuhan itu berujung dengan aksi saling serang antara masyarakat Kashmir sebagai oposisi yang menolak pencabutan status istimewa Kashmir dengan aparat kepolisian yang melindungi kebijakan pemerintahan India, aksi saling serang antara kedua kubu berbeda tujuan tersebut bahkan melibatkan saling serang menggunakan senjata (Wirayudha, 2019).

3.4. Konsekuensi Konflik

Penerapan Undang-Undang Citizenship Amendment Act (CAA) merugikan serta memberikan dampak buruk bagi kehidupan umat Muslim di India. Umat

Muslim merasa dirugikan karena pemberlakuan CAA oleh pemerintah India hanya diperuntukkan untuk para Imigran non Muslim yang mendapatkan diskriminasi di tiga negara yaitu Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan, bukan hanya itu, umat Muslim juga berpotensi tidak mendapatkan kewarganegaraan yang dapat menyebabkan mereka terkena pengusiran secara massal dari India. Rasa ketidakpuasan dan ketidaksetujuan akan penerapan CAA oleh pemerintah India menimbulkan aksi demonstrasi umat Muslim terhadap pemerintah India. Demonstrasi umat Muslim terhadap pemerintah India dengan harapan agar diperhatikan, dipedulikan serta diberi keadilan tidak mencegah pemerintah India memberlakukan CAA, namun sebaliknya demonstrasi umat Muslim mendapatkan hadangan balasan demonstrasi dari para nasionalisme Hindu yang mendukung CAA. Perseteruan antara demonstran umat Muslim penolak CAA dengan demonstran nasionalis Hindu pendukung CAA menyebabkan saling serang dan terjadi aksi kekerasan bahkan setelahnya menyebabkan konflik berkepanjangan yang berdampak terhadap kehidupan umat Muslim di India (Kontras, 2020).

Konflik antara umat Hindu dan Muslim akibat penerapan CAA kembali terjadi, tepatnya pada Minggu (23/02) di pinggiran kota Delhi. Perdana Menteri Narendra Modi dan partai nasionalis Hindu, Bharatiya Janata Party (BJP) beralasan bahwa adanya CAA tersebut adalah upaya untuk kebaikan umat agama minoritas yang terdampak persekusi di tiga negara, Pakistan, Afghanistan dan Bangladesh, namun tanpa disadari pemerintah India telah mengabaikan hak-hak berupa kewarganegaraan yang seharusnya diberikan dengan mudah kepada umat Muslim di India, konflik yang terjadi di pinggiran kota Delhi ini menyebabkan lebih dari 20

orang terbunuh dan banyak dari bangunan serta kendaraan hangus terbakar (INDONESIA, 2020).

Penerapan Amandement UU Kewarganegaraan di India membahayakan karena mampu melemahkan konstitusi sekuler negara serta mendiskriminasi umat Muslim di India. Yogendra Yadav, seorang aktifis politik mengatakan “Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan dua tingkatan kewarganegaraan di India: non-muslim dan muslim” (Krishan, 2024). Para kritikus menganggap bahwa Perdana Menteri Narendra Modi tengah menjalankan agenda nasionalis Hindu di India, hal tersebut tentu mengkhawatirkan, karena akan mempersempit ruang bagi kelompok minoritas, terkhusus umat Muslim, dan bahkan menuju perubahan India menjadi negara Hindu. Penerapan Amandement UU Kewarganegaraan yang didukung dengan adanya *National Register of Citizens* (NRC) berupaya untuk mengidentifikasi serta menyingkirkan para pendatang ilegal dan hal tersebut dikhawatirkan terjadi terhadap umat Muslim (Krishan, 2024).

Penerapan Amandement UU Kewarganegaraan yang kental akan memprioritaskan umat Hindu menjadikan umat agama minoritas semakin terpojok, fakta bahwa pada masa Pemerintahan Narendra Modi umat Muslim semakin intens mendapatkan serangan dari umat Hindu. Beberapa insiden pembunuhan yang disusul dengan penggantungan umat Muslim yang dilakukan oleh umat Hindu, selain itu banyak nya tuduhan terhadap umat Muslim yang memakan dan menyembunyikan daging sapi. Diskriminasi yang diterima umat Muslim bukan hanya dalam lingkup sosial dan politik namun juga ekonomi. Terbukti dari banyaknya bisnis-bisnis umat Muslim yang di boikot, tempat berjualan yang dibakar dan dihancurkan, bersamaan dengan itu psikis umat Muslim juga diserang

dengan banyaknya bangunan tempat tinggal umat Muslim dihancurkan, tempat ibadah dibakar, dan banyak seruan-seruan genosida terdengar.

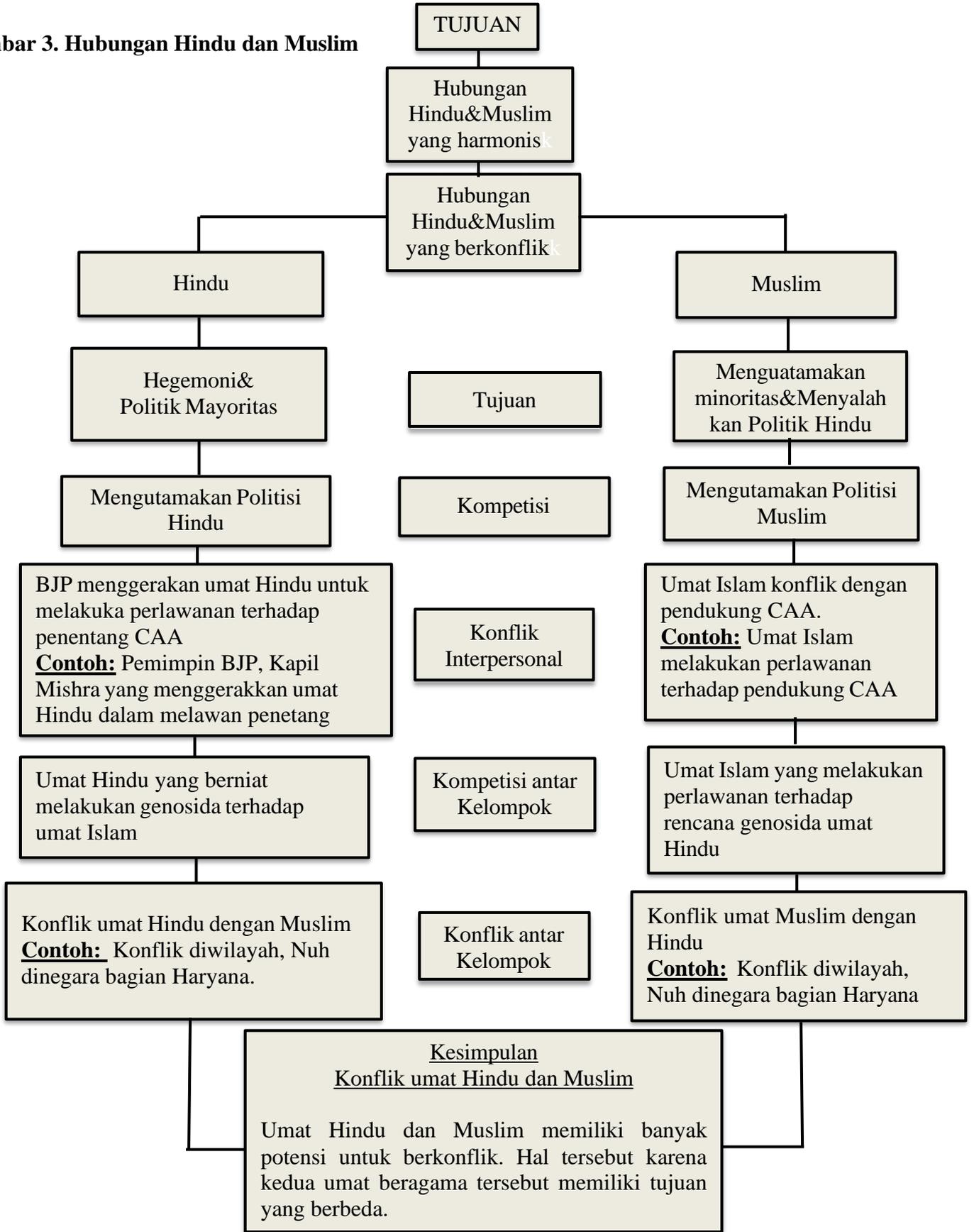
Pada 2023 Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF) terpantau memiliki data berbagai macam kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah India pada tingkat nasional, negara bagian, dan lokal yang berjalan pada tahun 2022 dan semua itu berdampak terhadap kelompok umat minoritas seperti Muslim, Kristen, Dalit, Sikh, dan Adivasis (masyarakat adat dan suku terjadwal). UU Amandement Kewarganegaraan dimanfaatkan oleh pemerintah India untuk menargetkan para pelaku konversi agama, mengatur hubungan antar agama, pemakaian jilbab, dan penyembelihan sapi. Pemerintah nasional juga menekan mereka yang kritis terhadap pemerintah, terkhusus menekan umat agama minoritas, dan mereka yang mengadvokasi atas nama mereka termasuk melalui pengawasan, pelecehan, penghancuran properti, dan penahanan di bawah UU Pencegahan Kegiatan Melawan Hukum (UAPA) (Sorongan, 2024).

Pencabutan pasal 370 yang memberikan status istimewa Kashmir oleh Pemerintah India berdampak besar terhadap umat Muslim. Pemerintah India mendapatkan guncangan karena banyaknya penduduk wilayah Kashmir yang dikuasai India tidak menghendaki jika harus berada dibawah pemerintahan India, mereka lebih memilih untuk bisa menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri atau opsi lainnya adalah bergabung dengan Pakistan. Pasca pencabutan pasal 370 tersebut banyak dari penduduk Kashmir yang mengalami pengangguran, kondisi yang ada diperburuk dengan adanya tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pasukan keamanan India untuk mengendalikan para pengunjuk rasa dan

menghadapi para pemberontak (INDONESIA, 2019). Pencabutan pasal 370 menyebabkan ketakutan akan adanya perubahan demografi di lembah Kashmir, selain itu penduduk Muslim Kashmir mencurigai bahwa keputusan pencabutan status istimewa Kashmir adalah strategi dari kelompok-kelompok Hindu yang berupaya mempersilakan umat Hindu untuk pindah ke negara bagian Kasmir.

Mantan Menteri Besar Kashmir, Mehbooba Mufti berbicara kepada pengarang dan Aatish Taseer dalam wawancara eksklusif untuk BBC, Mufti mengatakan “Pencabutan status istimewa dilatari perencanaan yang jahat, mereka hanya ingin menduduki tanah kami dan ingin membuat negara bagian berpenduduk mayoritas Muslim ini seperti negara bagian lain dan membuat kami menjadi minoritas dan mencabut wewenang kami secara total” (INDONESIA, 2019).

Gambar 3. Hubungan Hindu dan Muslim



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

India merupakan negara sekuler penuh sejarah yang ditempati oleh masyarakat multietnis. Beragam adat, budaya dan kebiasaan senantiasa mewarnai kehidupan sosial antar masyarakat dan toleransi beragama di India merupakan hal penting untuk dijalankan. Toleransi antar masyarakat beragama menjadikan kehidupan bermasyarakat penuh dengan kedamaian dan ketenangan hingga menghasilkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Hidup saling berdampingan antar masyarakat berbeza agama tentu tidaklah mudah harus ada rasa saling peduli, rasa saling mengasihi dan tidak mengedepankan ego semata, karena dengan cara tersebut semua masyarakat beragama dapat merasakan kedamaian.

Kehidupan sosial masyarakat beragam rentan akan terjadinya perselisihan, kompetisi dan konflik yang disebabkan oleh perbedaan tujuan, sebagaimana yang terjadi diantara umat Hindu dan Muslim di India. Umat Hindu dan Muslim merupakan dua umat Beragama terbanyak di India. Umat Hindu merupakan masyarakat mayoritas diikuti oleh umat Muslim. Dalam sejarah hubungan umat Hindu dan Muslim banyak diwarnai dengan konflik, umat Hindu dan Muslim sempat bekerjasama pada masa kolonialisme Inggris di India melawan para penjajah. Umat Hindu dan Muslim saling bekerjasama hingga akhirnya India mendapatkan kemerdekaanya, namun hal yang disayangkan umat Hindu dan Muslim harus terpisah dengan terbaginya kekuasaan menjadi dua negara yaitu Pakistan dan India.

Terbentuknya Pakistan dan India merupakan awal baru yang mengawali perseteruan umat Hindu dan Muslim. Terbentuknya Pakistan dianggap umat Hindu merupakan pengkhianatan umat Muslim terhadap India hingga akhirnya diantara kedua umat beragama tersebut sering terjadi konflik. Dengan teori konflik realistik penelitian ini menjelaskan bahwa awal mula terjadinya konflik antara umat Hindu dan Muslim adalah karena perbedaan tujuan, dari perbedaan tujuan melahirkan sebuah kompetisi dan menyebabkan konflik interpersonal, kemudian berimbas dengan munculnya kompetisi skala besar yaitu kompetisi antarkelompok dan diakhiri konflik antar kelompok.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menyadari akan masih banyaknya kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, yang semoga dapat ditingkatkan lagi pada penelitian selanjutnya. Saran dan Rekomendasi sangat diharapkan guna penelitian yang lebih baik lagi nantinya. Penelitian ini berfokus terhadap konflik diantara umat Hindu dan Muslim di India pada masa pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi. Diharapkan penelitian selanjut bisa lebih detail lagi dalam menerangkan sejarah hubungan antara umat Hindu dan Muslim di India dimasa lampau hingga saat ini.

DAFTARPUSTAKA

- Aljazeera. (2023). *Apa itu Pasal 370? Apa yang perlu diketahui tentang putusan pengadilan tinggi India tentang Kashmir*. Aljazeera.Com. <https://www.aljazeera.com/news/2023/12/11/whats-article-370-what-to-know-about-india-top-court-verdict-on-kashmir>
- BBC. (n.d.). *CAA: Penjelasan undang-undang kewarganegaraan baru India*. Bbc.Com. Retrieved March 17, 2024, from <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50670393>
- Biswas, S. (2023). *“Mereka bilang tidak akan mendapat suara Hindu”*: Asaduddin Owaisi tentang mengapa AIMIM tidak bergabung dengan blok INDIA. Livemint.Com. <https://www.livemint.com/politics/news/asaduddin-owaisi-on-why-aimim-didnt-join-india-bloc-they-said-wont-get-hindu-votes-11695053895588.html>
- INDONESIA, B. N. (2019). *Status khusus Jammu dan Kashmir dicabut: “Hari paling kelam” kata politikus negara bagian berpenduduk Muslim terbesar di India*. Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49235674>
- Krishnan, M. (2022). *Pemerintah India Mau Nilai-Nilai Hindu Jadi Ideologi Negara*. Dw.Com. <https://www.dw.com/id/pemerintah-india-mau-nilai-nilai-hindu-jadi-ideologi-negara/a-60856452>
- Sahgal, N. (2021). *Agama di India: Toleransi dan Segregasi*. Pewresearch.Org. <https://www.pewresearch.org/religion/2021/06/29/religion-in-india-tolerance-and-segregation/>
- Sukla, S. (2021). *Apa sebenarnya arti Hindutva?* Hinduamerican.Org. <https://www.hinduamerican.org/blog/what-does-hindutva-mean>
- VOA. (2023). *PM Modi Tepis Adanya Diskriminasi Agama di India*. Voaindonesia.Com. <https://www.voaindonesia.com/a/pm-modi-tepis-adanya-diskriminasi-agama-di-india-/7149588.html>
- Yunariono, B. (2023). *Konflik Umat Hindu - Muslim Di India Era Pemerintahan Narendra Modi*. 27(2), 219–237. <https://doi.org/https://doi.org/10.31315/>

- Ahmed, S. (2021, Oktober 2). *Fragmentasi Hindu-Muslim: Akibat Warisan Kolonial India*. Diambil kembali dari humanrightspulse.com: <https://www.humanrightspulse.com/mastercontentblog/hindu-muslim-fragmentation-a-consequence-of-indias-colonial-legacy>
- Ahmed, S. (2021, Oktober 2). *Fragmentasi Hindu-Muslim: Akibat Warisan Kolonial India*. Diambil kembali dari humanrightspulse.com: <https://www.humanrightspulse.com/mastercontentblog/hindu-muslim-fragmentation-a-consequence-of-indias-colonial-legacy>
- Aini, N. (2019, Agustus 15). *Sejarah Hari Ini: India Merdeka dari Inggris*. Diambil kembali dari republika.co.id: <https://internasional.republika.co.id/berita/pw9ono382/sejarah-hari-ini-india-merdeka-dari-inggris>
- Arbar, T. F. (2022, July 01). *Konflik Hindu-Islam di India Memanas, Satu Kota "Lockdown"!* Diambil kembali dari cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220701125028-4-352137/konflik-hindu-islam-di-india-memanas-satu-kota-lockdown>
- Ardiansyah, R. (2016, February 22). *Penjajahan Inggris di India*. Diambil kembali dari idsejarah.net: <https://idsejarah.net/2016/02/prnjajahan-inggris-di-india.html>
- Ashari, H. (2002). *Modernisasi Islam, Tokoh Gagasan, dan Gerakan*. Bandung: Citra Pustaka Media.
- Ayyub, R. (2023, Mei 11). *Modi mengobarkan kebencian terhadap umat Islam di India, sementara dunia melihat ke arah lain*. Diambil kembali dari washingtonpost.com: <https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/05/11/modi-india-muslims-hatred-incitement/>
- BBC. (t.thn.).
- BBC. (2019, February 26). *Viewpoint: Balakot air strikes raise stakes in India-Pakistan stand-off*. Diambil kembali dari bbc.com: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-47370608?intlink_from_url=https://www.bbc.co.uk/news/topics/cgmkz7g3xn0t/pulwama-attack&link_location=live-reporting-story
- BBC. (2022, Agustus 15). *Pemisahan: Mengapa British India terpecah 75 tahun yang lalu?* Diambil kembali dari bbc.com: <https://www.bbc.com/news/world-south-asia-62467438>
- BBC. (n.d, - -). *Kolonialisme Inggris di India*. Diambil kembali dari bbc.co.uk: <https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z7kvf82/articles/zx8sf82#zcyq2v4>
- Bellows, K. (n.d, - -). *India Dalam Warna*. Diambil kembali dari greatrail.com: <https://www.greatrail.com/indiaincolour>
- Biswas, S. (2024, April 29). *Bagaimana rasanya menjadi seorang Muslim di India yang dipimpin Narendra Modi?* Diambil kembali dari bbc.com: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cglvz4epkyvo>

- Borders, R. w. (n.d., - -). *India in the 2019 World Press Freedom Index*. Diambil kembali dari rsf.org: <https://rsf.org/en/country/india>
- Brass, P. R. (2003). *The Production of Hindu-Muslim Violence in Contemporary India*. USA: University of Washington Press.
- Center, P. R. (2021, Juni 29). *Agama di India: Toleransi dan Segregasi*. Diambil kembali dari pewresearch.org: <https://www.pewresearch.org/religion/2021/06/29/religion-in-india-tolerance-and-segregation/>
- Center, P. R. (2021, Juni 29). *Agama di India: Toleransi dan Segregasi*. Diambil kembali dari pewresearch.org: <https://www.pewresearch.org/religion/2021/06/29/religion-in-india-tolerance-and-segregation/>
- Chadha, S. (2023, November 3). *Memahami sekularisme di India*. Diambil kembali dari indiatimes.com: <https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/blunt-frank/understanding-secularism-in-india/>
- Das, K. N. (2021, November 19). *Kebijakan kontroversial PM India Modi, pembalikan*. Diambil kembali dari reuters.com: <https://www.reuters.com/markets/commodities/indian-pm-modis-controversial-policies-reversals-2021-11-19/>
- Dzulfaroh&Hardiyanto. (2019, Agustus 15). *Hari Ini dalam Sejarah: India Lepas dari Kolonialisme Inggris*. Diambil kembali dari kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2019/08/15/10022591/hari-ini-dalam-sejarah-india-lepas-dari-kolonialisme-inggris>
- Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research* 27 (3), 291-305.
- Guha, D. (2019, Desember 12). *Opini: UU Kewarganegaraan Baru India Melanggar Konstitusi*. Diambil kembali dari dw.com: <https://www.dw.com/id/opini-uu-kewarganegaraan-baru-india-bertentangan-dengan-konstitusi/a-51643351>
- Hafil, M. (2022, Juni 8). *Sejarah Terpisahnya India dan Pakistan*. Diambil kembali dari republika.co.id: <https://khazanah.republika.co.id/berita/rd5vtv430/sejarah-terpisahnya-india-dan-pakistan>
- Hamid, A. (2010). *Pemikiran Modern Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- India, T. T. (2014, July 27). *Birth of 2nd republic under Modi: Sanjaya Baru*. Diambil kembali dari timesofindia.indiatimes.com: <https://timesofindia.indiatimes.com/india/birth-of-2nd-republic-under-modi-sanjaya-baru/articleshow/39078542.cms>
- INDONESIA, B. N. (2019, Agustus 6). *Mengapa pencabutan status daerah istimewa Kashmir oleh India dianggap kontroversial? Tiga hal yang layak diketahui*. Diambil kembali dari bbc.com: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49250404>
- INDONESIA, B. N. (2019, Agustus 06). *Mengapa pencabutan status daerah istimewa Kashmir oleh India dianggap kontroversial? Tiga hal yang layak diketahui*. Diambil kembali dari bbc.com: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49250404>

- INDONESIA, B. N. (2020, Februari 28). *Bentrok antar umat beragama di India, puluhan orang meninggal dunia*. Diambil kembali dari bbc.com: <https://www.bbc.com/indonesia/media-51670683>
- INDONESIA, B. N. (2021, November 21). *Kisah aksi boikot umat Muslim dan Hindu India atas kunjungan Pangeran Inggris yang berlanjut menjadi kerusuhan*. Diambil kembali dari bbc.com: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59342637>
- Indonesia, C. (2020, february 28). *Mengurai Benih Konflik Hindu-Muslim di India*. Diambil kembali dari cnnindonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200228184012-113-479195/mengurai-benih-konflik-hindu-muslim-di-india>
- Indonesia, C. (2022, Juli 1). *Apa Biang Kerok Konflik Hindu-Islam di India Makin Sering Terjadi?* Diambil kembali dari cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220630184929-113-815730/apa-biang-kerok-konflik-hindu-islam-di-india-makin-sering-terjadi/2>
- Indonesia, C. (2022, Juni 30). *Netizen India Ancam Warga Muslim Buntut Pemenggalan Penjahit Hindu*. Diambil kembali dari cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220630151302-113-815607/netizen-india-ancam-warga-muslim-buntut-pemenggalan-penjahit-hindu>
- Indonesia, C. (2022, Agustus 12). *Pendeta Ngotot India Harus jadi Negara Hindu: Paham Gandhi Usang*. Diambil kembali dari cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220812125947-113-833830/pendeta-ngotot-india-harus-jadi-negara-hindu-paham-gandhi-usang>
- Indonesia, C. (2023, Agustus 01). *Kelompok Hindu & Muslim India Bentrok, Korban Berjatuh*. Diambil kembali dari cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230801204122-4-459324/kelompok-hindu-muslim-india-bentrok-korban-berjatuh>
- Jaffrelot, C. (2019, April 4). *Nasib Sekularisme di India*. Diambil kembali dari carnegieendowment.org: <https://carnegieendowment.org/2019/04/04/fate-of-secularism-in-india-pub-78689>
- Jain, R. (2024, February 8). *Sebuah negara bagian kecil di India mengeluarkan peraturan sipil penting yang ditentang oleh umat Islam*. Diambil kembali dari reuters.com: <https://www.reuters.com/world/india/small-indian-state-passes-landmark-civil-code-opposed-by-muslims-2024-02-07/>
- Klocek, J. (2020, Mei 13). *Memerangi Diskriminasi Agama di India dan sekitarnya*. Diambil kembali dari usip.org: <https://www.usip.org/publications/2020/05/combating-religious-discrimination-india-and-beyond>
- Kontras. (2020, Maret 13). *Gerakan Anti-Muslim di India: Pemerintah India Harus Segera Mengambil Tindakan*. Diambil kembali dari kontras.org: <https://kontras.org/2020/03/13/gerakan-anti-muslim-di-india-pemerintah-india-harus-segera-mengambil-tindakan/>
- Krishan, M. (2024, Maret 14). *Mengapa UU Kewarganegaraan di India Begitu Kontroversial?* Diambil kembali dari dw.com:

- <https://www.dw.com/id/mengapa-uu-kewarganegaraan-di-india-begitu-kontroversial/a-68517578>
- Krishnan, M. (2022, Februari 21). *Pemerintah India Mau Nilai-Nilai Hindu Jadi Ideologi Negara*. Diambil kembali dari dw.com: <https://www.dw.com/id/pemerintah-india-mau-nilai-nilai-hindu-jadi-ideologi-negara/a-60856452>
- Kumparan. (2022, Oktober 25). *Mengenal Agama di India, Mulai dari Hindu hingga Sikh*. Diambil kembali dari kumparan.com: <https://kumparan.com/berita-hari-ini/mengenal-agama-di-india-mulai-dari-hindu-hingga-sikh-1z7SNKDra8k/full>
- Kumparan. (2023, April 18). *Hindutva, Ideologi Ekstremis Hindu di India Pemicu Konflik Umat Beragama*. Diambil kembali dari kumparan.com: <https://kumparan.com/kumparannews/hindutva-ideologi-ekstremis-hindu-di-india-pemicu-konflik-umat-beragama-20Ed9kKBTNL>
- Lapidus, M. I. (1999). *Sejarah Sosial Ummat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Leidig, E. (2020, Juli 17). *Hindutva sebagai varian dari ekstremisme sayap kanan*. Diambil kembali dari tandfonline.com: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0031322X.2020.1759861>
- Maan, E. A. (2021, Mei 26). *Konflik Hindu-Muslim di Bawah Modi*. Diambil kembali dari traileoni.it: <https://traileoni.it/2021/05/the-hindu-muslim-conflict-under-modi/>
- Maizland, L. (2022, Juli 14). *Muslim India: Populasi yang semakin terpinggirkan*. Diambil kembali dari cfr.org: <https://www.cfr.org/backgrounder/india-muslims-marginalized-population-bjp-modi>
- Merdeka. (n.d, - -). *Peristiwa 15 Agustus: India Merdeka dari Jajahan Inggris, Begini Sejarah dan Faktanya*. Diambil kembali dari merdeka.com: <https://www.merdeka.com/jateng/peristiwa-15-agustus-india-merdeka-dari-jajahan-inggris-begini-sejarah-dan-faktany-klm.html>
- Narayanan, A. (2020, February 16). *Hubungan Hindu-Muslim di India*. Diambil kembali dari medium.com: <https://medium.com/@charitn/hindu-islamic-relations-in-india-827461a58fa1>
- Narayanan, A. (2020, Februari 16). *Hubungan Hindu-Muslim di India*. Diambil kembali dari medium.com: <https://medium.com/@charitn/hindu-islamic-relations-in-india-827461a58fa1>
- Nashrullah, N. (2020, Agustus 21). *Sejak Kapan Hubungan Hindu-Muslim di India Memburuk?*. Diambil kembali dari republika: <https://www.republika.co.id/berita/qfer96320/sejak-kapan-hubungan-hindumuslim-di-india-memburuk>
- Nursalikah, A. (2020, Agustus 07). *Aneksasi Kashmir Sebabkan Hubungan Hindu-Muslim Terbelah*. Diambil kembali dari republika.co.id: <https://khazanah.republika.co.id/berita/qenav9366/aneksasi-kashmir-sebabkan-hubungan-hindu-muslim-terbelah?>
- Organizer. (2021, July 6). *AIMIM: Partai Politik Didirikan untuk Mempromosikan Kepentingan Nizam dari Hyderabad dan Menentang Integrasi Hyderabad*. Diambil kembali dari organiser.org: https://organiser.org/2021/07/06/22982/bharat/mim/#google_vignette

- Pandu, M. (2020, Maret 5). *Konflik Muslim-Hindu di India adalah Buah dari Mayoritarianisme yang Melembaga, Alih-alih Agama*. Diambil kembali dari islami.co: <https://islami.co/konflik-muslim-hindu-di-india-adalah-buah-dari-mayoritarianisme-yang-melembaga-alih-alih-agama/>
- reliefweb. (2022, Juni 28). *Kekerasan di Kashmir: Mengapa lonjakan pembunuhan menandakan tren baru yang tidak menyenangkan*. Diambil kembali dari reliefweb.int: <https://reliefweb.int/report/india/violence-kashmir-why-spike-killings-signals-ominous-new-trend>
- Republik. (2023, Mei 15). *Melacak Awal Mula Islam di India*. Diambil kembali dari republika.id: <https://www.republika.id/posts/40767/melacak-awal-mula-islam-di-india>
- Republika. (2022, November 27). *Kesultanan Mughal dan Dominasi Inggris di India*. Diambil kembali dari republika.co.id: <https://islamdigest.republika.co.id/berita/rlzaxj2925000/kesultanan-mughal-dan-dominasi-inggris-di-india?>
- Republika. (2023, Agustus 2). *Saat Muslim-Hindu Bersatu di India, Penjajah Kocar-Kacir*. Diambil kembali dari republika.id: <https://www.republika.id/posts/43821/saat-muslim-hindu-bersatu-di-india-penjajah-kocar-kacir>
- Rozi, I. F. (2023, - 1). *Mengenal Definisi Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Diambil kembali dari binus.ac.id: <https://binus.ac.id/bandung/2023/01/mengenal-definisi-kekerasan-menurut-johan-galtung/>
- Sajjad, M. W. (2018). Examining the state of muslim minority under Modi's BJP since 2014. *Strategic Studies*, 19-36.
- Sajjad, M. W. (2018). Examining the state of muslim minority under Modi's BJP since 2014. *Strategic Studies*, 19-36.
- Shaban, A. (2018). *Lives Of Muslims In India Politics, Exclusion And Violence*. New York: Routledge.
- Shankar, S. (2021, April 13). *Tawaran Asaduddin Owaisi untuk Mendefinisikan Ulang Sekularisme India*. Diambil kembali dari foreignpolicy.com: <https://foreignpolicy.com/2021/04/13/asaduddin-owaisi-muslim-india-secular-party/>
- Sharma, A. (2020). Tentang Perbedaan Antara Hinduisme dan Hindutva. *Filsafat dan Agama Asia*, 43-47.
- Sholekha, A. (2019, Desember 20). *Begini 12 Fakta Kehidupan di India Selama Penjajahan Inggris*. Diambil kembali dari idntimes.com: <https://www.idntimes.com/science/discovery/amelia-solekha/begini-kehidupan-di-india-selama-penjajahan-inggris-c1c2>
- Sorongon, T. P. (2024, Maret 14). *Kronologi India Ketok UU "Singkirkan" Warga Muslim, Ini yang Terjadi*. Diambil kembali dari cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240314071656-4-521778/kronologi-india-ketok-uu-singkirkan-warga-muslim-ini-yang-terjadi>
- Srivastava, N. (2019, Desember 12). *Bagaimana Perdana Menteri Narendra Modi membuat cemas Muslim di India*. Diambil kembali dari bbc: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50756563>

- Sudha, R. (2020). Hindutva violence in India: Trends and implications. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 15-20.
- Tahier, D. (2018, Mei 16). *Warna-warni Pernikahan Adat Muslim India*. Diambil kembali dari detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-4023145/warna-warni-pernikahan-adat-muslim-india>
- Taylor&Moghaddam. (1987, - -). *Realistic Conflict Theory*. Diambil kembali dari psychologie. uni-frankfrut.de: https://www.psychologie.uni-frankfurt.de/68850406/Taylor_Moghaddam_1987_Realistic_Conflict_Theory.pdf
- Thapar, R. (2019, Mei 17). *Mereka Menjajakan Mitos dan Menyebutnya Sejarah*. Diambil kembali dari nytimes.com: <https://www.nytimes.com/2019/05/17/opinion/india-elections-modi-history.html>
- toppr. (n.d, - -). *India Setelah Kemerdekaan*. Diambil kembali dari toppr.com: <https://www.toppr.com/guides/history/india-after-independence/india-after-independence/>
- Truschke, A. (2023, Oktober 6). *Bagaimana Nasionalis Hindu India Mempersenjatai Sejarah Melawan Muslim*. Diambil kembali dari time.com: <https://time.com/6320003/india-weaponizing-history-against-muslims/>
- Vaishnav, M. (2018, Oktober 11). *Apa Rahasia Kesuksesan Partai Bharatiya Janata (BJP) India?* Diambil kembali dari carnegieendowment.org: <https://carnegieendowment.org/2018/10/11/what-is-secret-to-success-of-india-s-bharatiya-janata-party-bjp-pub-77477>
- Varshney, A. (2002). *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*. USA: Yale University Press.
- Vergheese, A. (2018, Agustus 23). *Pemerintahan Inggris dan Kerusuhan Hindu-Muslim di India: Penilaian Ulang*. Diambil kembali dari berkleycenter.georgetown.edu: <https://berkleycenter.georgetown.edu/responses/british-rule-and-hindu-muslim-riots-in-india-a-reassessment>
- Vergheese, A. (2018, Agustus 23). *Pemerintahan Inggris dan Kerusuhan Hindu-Muslim di India: Penilaian Ulang*. Diambil kembali dari berkleycenter.georgetown.edu: <https://berkleycenter.georgetown.edu/responses/british-rule-and-hindu-muslim-riots-in-india-a-reassessment>
- Waikar, P. (2018). Reading islamphobia in hindutva: An analysis of Narendra Modi's political discourse. *Islamophobia Studies Journal*, 161-180.
- Welle, D. (2020, Maret 6). *Umat Muslim dan Hindu di India Bersatu Lawan Kekerasan*. Diambil kembali dari detikNews: <https://news.detik.com/dw/d-4928398/umat-muslim-dan-hindu-di-india-bersatu-lawan-kekerasan>
- Wilson, J. (2016, September 7). *Sudut Pandang: Mitos 'kuat' pemerintahan Inggris di India*. Diambil kembali dari bbc.com: <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-37094519>
- Wirayudha, R. (2019, Agustus 08). *Konflik Kashmir Tiada Akhir*. Diambil kembali dari historia.id: <https://historia.id/politik/articles/konflik-kashmir-tiada-akhir-P1Ro2/page/1>

- Wirayudha, R. (2019, Agustus 8). *Konflik Kashmir Tiada Akhir*. Diambil kembali dari historia.id: <https://historia.id/politik/articles/konflik-kashmir-tiada-akhir-P1Ro2/page/1>
- Wirayudha, R. (2020, February 27). *Konflik Muslim-Hindu India dari Masa ke Masa*. Diambil kembali dari Historia: <https://historia.id/agama/articles/konflik-muslim-hindu-india-dari-masa-ke-masa-P4nbM/page/1>
- Wirayudha, R. (2020, Februari 27). *Konflik Muslim-Hindu India dari Masa ke Masa*. Diambil kembali dari historia.id: <https://historia.id/agama/articles/konflik-muslim-hindu-india-dari-masa-ke-masa-P4nbM/page/1>
- Wirayudha, R. (2020, Februari 27). *Konflik Muslim-Hindu India dari Masa ke Masa*. Diambil kembali dari historia.id: <https://historia.id/agama/articles/konflik-muslim-hindu-india-dari-masa-ke-masa-P4nbM>
- Yanwardhana, E. (2022, January 16). *Ramai Seruan 'Genosida Muslim' di India, Ada Apa?* Diambil kembali dari cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220116070944-4-307646/ramai-seruan-genosida-muslim-di-india-ada-apa>
- Zakaria, A. (2022, December 9). *The Ongoing Legacies of the Partition of British India*. Diambil kembali dari asiasociety.org: <https://asiasociety.org/magazine/article/ongoing-legacies-partition-british-india>
- Zulfaijah, S. U. (2022, September 2). *Sinopsis Film India The Kashmir Files*. Diambil kembali dari antvklik.com: <https://www.antvklik.com/sinopsis/562195-sinopsis-film-india-the-kashmir-files?page=1>
-
- Ahmed, S. (2021, Oktober 2). *Fragmentasi Hindu-Muslim: Akibat Warisan Kolonial India*. Retrieved from humanrightspulse.com: <https://www.humanrightspulse.com/mastercontentblog/hindu-muslim-fragmentation-a-consequence-of-indias-colonial-legacy>
- Ahmed, S. (2021, Oktober 2). *Fragmentasi Hindu-Muslim: Akibat Warisan Kolonial India*. Retrieved from humanrightspulse.com: <https://www.humanrightspulse.com/mastercontentblog/hindu-muslim-fragmentation-a-consequence-of-indias-colonial-legacy>
- Aini, N. (2019, Agustus 15). *Sejarah Hari Ini: India Merdeka dari Inggris*. Retrieved from republika.co.id: <https://internasional.republika.co.id/berita/pw9ono382/sejarah-hari-ini-india-merdeka-dari-inggris>
- Arbar, T. F. (2022, July 01). *Konflik Hindu-Islam di India Memanas, Satu Kota "Lockdown"*! Retrieved from cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220701125028-4-352137/konflik-hindu-islam-di-india-memanas-satu-kota-lockdown>

- Ardiansyah, R. (2016, February 22). *Penjajahan Inggris di India*. Retrieved from idsejarah.net: <https://idsejarah.net/2016/02/prnjajahan-inggris-di-india.html>
- Ashari, H. (2002). *Modernisasi Islam, Tokoh Gagasan, dan Gerakan*. Bandung: Citra Pustaka Media.
- Ayyub, R. (2023, Mei 11). *Modi mengobarkan kebencian terhadap umat Islam di India, sementara dunia melihat ke arah lain*. Retrieved from washingtonpost.com: <https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/05/11/modi-india-muslims-hatred-incitement/>
- BBC. (n.d.).
- BBC. (2019, February 26). *Viewpoint: Balakot air strikes raise stakes in India-Pakistan stand-off*. Retrieved from bbc.com: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-47370608?intlink_from_url=https://www.bbc.co.uk/news/topics/cgmkz7g3xn0t/pulwama-attack&link_location=live-reporting-story
- BBC. (2022, Agustus 15). *Pemisahan: Mengapa British India terpecah 75 tahun yang lalu?* Retrieved from bbc.com: <https://www.bbc.com/news/world-south-asia-62467438>
- BBC. (n.d, - -). *Kolonialisme Inggris di India*. Retrieved from bbc.co.uk: <https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z7kvf82/articles/zx8sf82#zcyq2v4>
- Bellows, K. (n.d, - -). *India Dalam Warna*. Retrieved from greatrail.com: <https://www.greatrail.com/indiaicolour>
- Biswas, S. (2024, April 29). *Bagaimana rasanya menjadi seorang Muslim di India yang dipimpin Narendra Modi?* Retrieved from bbc.com: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cglvz4epkyvo>
- Borders, R. w. (n.d., - -). *India in the 2019 World Press Freedom Index*. Retrieved from rsf.org: <https://rsf.org/en/country/india>
- Brass, P. R. (2003). *The Production of Hindu-Muslim Violence in Contemporary India*. USA: University of Washington Press.
- Center, P. R. (2021, Juni 29). *Agama di India: Toleransi dan Segregasi*. Retrieved from pewresearch.org: <https://www.pewresearch.org/religion/2021/06/29/religion-in-india-tolerance-and-segregation/>
- Center, P. R. (2021, Juni 29). *Agama di India: Toleransi dan Segregasi*. Retrieved from pewresearch.org: <https://www.pewresearch.org/religion/2021/06/29/religion-in-india-tolerance-and-segregation/>
- Chadha, S. (2023, November 3). *Memahami sekularisme di India*. Retrieved from indiatimes.com: <https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/blunt-frank/understanding-secularism-in-india/>
- Das, K. N. (2021, November 19). *Kebijakan kontroversial PM India Modi, pembalikan*. Retrieved from reuters.com: <https://www.reuters.com/markets/commodities/indian-pm-modis-controversial-policies-reversals-2021-11-19/>
- Dzulfaroh&Hardiyanto. (2019, Agustus 15). *Hari Ini dalam Sejarah: India Lepas dari Kolonialisme Inggris*. Retrieved from kompas.com:

- <https://internasional.kompas.com/read/2019/08/15/10022591/hari-ini-dalam-sejarah-india-lepas-dari-kolonialisme-inggris>
- Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research* 27 (3), 291-305.
- Guha, D. (2019, Desember 12). *Opini: UU Kewarganegaraan Baru India Melanggar Konstitusi*. Retrieved from dw.com:
<https://www.dw.com/id/opini-uu-kewarganegaraan-baru-india-bertentangan-dengan-konstitusi/a-51643351>
- Hafil, M. (2022, Juni 8). *Sejarah Terpisahnya India dan Pakistan*. Retrieved from republika.co.id: <https://khazanah.republika.co.id/berita/rd5vtv430/sejarah-terpisahnya-india-dan-pakistan>
- Hamid, A. (2010). *Pemikiran Modern Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- India, T. T. (2014, July 27). *Birth of 2nd republic under Modi: Sanjaya Baru*. Retrieved from timesofindia.indiatimes.com:
<https://timesofindia.indiatimes.com/india/birth-of-2nd-republic-under-modi-sanjaya-baru/articleshow/39078542.cms>
- INDONESIA, B. N. (2019, Agustus 6). *Mengapa pencabutan status daerah istimewa Kashmir oleh India dianggap kontroversial? Tiga hal yang layak diketahui*. Retrieved from bbc.com:
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49250404>
- INDONESIA, B. N. (2019, Agustus 06). *Mengapa pencabutan status daerah istimewa Kashmir oleh India dianggap kontroversial? Tiga hal yang layak diketahui*. Retrieved from bbc.com:
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49250404>
- INDONESIA, B. N. (2020, Februari 28). *Bentrok antar umat beragama di India, puluhan orang meninggal dunia*. Retrieved from bbc.com:
<https://www.bbc.com/indonesia/media-51670683>
- INDONESIA, B. N. (2021, November 21). *Kisah aksi boikot umat Muslim dan Hindu India atas kunjungan Pangeran Inggris yang berlanjut menjadi kerusuhan*. Retrieved from bbc.com:
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59342637>
- Indonesia, C. (2020, february 28). *Mengurai Benih Konflik Hindu-Muslim di India*. Retrieved from cnnindonesia:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200228184012-113-479195/mengurai-benih-konflik-hindu-muslim-di-india>
- Indonesia, C. (2022, Juli 1). *Apa Biang Kerok Konflik Hindu-Islam di India Makin Sering Terjadi?* Retrieved from cnnindonesia.com:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220630184929-113-815730/apa-biang-kerok-konflik-hindu-islam-di-india-makin-sering-terjadi/2>
- Indonesia, C. (2022, Juni 30). *Netizen India Ancam Warga Muslim Buntut Pemenggalan Penjahit Hindu*. Retrieved from cnnindonesia.com:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220630151302-113-815607/netizen-india-ancam-warga-muslim-buntut-pemenggalan-penjahit-hindu>
- Indonesia, C. (2022, Agustus 12). *Pendeta Ngotot India Harus jadi Negara Hindu: Pahami Gandhi Usang*. Retrieved from cnnindonesia.com:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220812125947-113->

- 833830/pendeta-ngotot-india-harus-jadi-negara-hindu-paham-gandhi-usang
- Indonesia, C. (2023, Agustus 01). *Kelompok Hindu & Muslim India Bentrok, Korban Berjatuhannya*. Retrieved from [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230801204122-4-459324/kelompok-hindu-muslim-india-bentrok-korban-berjatuhannya):
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230801204122-4-459324/kelompok-hindu-muslim-india-bentrok-korban-berjatuhannya>
- Jaffrelot, C. (2019, April 4). *Nasib Sekularisme di India*. Retrieved from carnegieendowment.org: <https://carnegieendowment.org/2019/04/04/fate-of-secularism-in-india-pub-78689>
- Jain, R. (2024, February 8). *Sebuah negara bagian kecil di India mengeluarkan peraturan sipil penting yang ditentang oleh umat Islam*. Retrieved from [reuters.com](https://www.reuters.com): <https://www.reuters.com/world/india/small-indian-state-passes-landmark-civil-code-opposed-by-muslims-2024-02-07/>
- Klocek, J. (2020, Mei 13). *Memerangi Diskriminasi Agama di India dan sekitarnya*. Retrieved from [usip.org](https://www.usip.org):
<https://www.usip.org/publications/2020/05/combating-religious-discrimination-india-and-beyond>
- Kontras. (2020, Maret 13). *Gerakan Anti-Muslim di India: Pemerintah India Harus Segera Mengambil Tindakan*. Retrieved from kontras.org:
<https://kontras.org/2020/03/13/gerakan-anti-muslim-di-india-pemerintah-india-harus-segera-mengambil-tindakan/>
- Krishan, M. (2024, Maret 14). *Mengapa UU Kewarganegaraan di India Begitu Kontroversial?* Retrieved from [dw.com](https://www.dw.com): <https://www.dw.com/id/mengapa-uu-kewarganegaraan-di-india-begitu-kontroversial/a-68517578>
- Krishnan, M. (2022, Februari 21). *Pemerintah India Mau Nilai-Nilai Hindu Jadi Ideologi Negara*. Retrieved from [dw.com](https://www.dw.com):
<https://www.dw.com/id/pemerintah-india-mau-nilai-nilai-hindu-jadi-ideologi-negara/a-60856452>
- Kumparan. (2022, Oktober 25). *Mengenal Agama di India, Mulai dari Hindu hingga Sikh*. Retrieved from kumparan.com: <https://kumparan.com/berita-hari-ini/mengenal-agama-di-india-mulai-dari-hindu-hingga-sikh-1z7SNKDra8k/full>
- Kumparan. (2023, April 18). *Hindutva, Ideologi Ekstremis Hindu di India Pemicu Konflik Umat Beragama*. Retrieved from kumparan.com:
<https://kumparan.com/kumparannews/hindutva-ideologi-ekstremis-hindu-di-india-pemicu-konflik-umat-beragama-20Ed9kKBTNL>
- Lapidus, M. I. (1999). *Sejarah Sosial Ummat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Leidig, E. (2020, Juli 17). *Hindutva sebagai varian dari ekstremisme sayap kanan*. Retrieved from [tandfonline.com](https://www.tandfonline.com):
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0031322X.2020.1759861>
- Maan, E. A. (2021, Mei 26). *Konflik Hindu-Muslim di Bawah Modi*. Retrieved from traileoni.it: <https://traileoni.it/2021/05/the-hindu-muslim-conflict-under-modi/>
- Maizland, L. (2022, Juli 14). *Muslim India: Populasi yang semakin terpinggirkan*. Retrieved from [cfr.org](https://www.cfr.org): <https://www.cfr.org/background/india-muslims-marginalized-population-bjp-modi>

- Merdeka. (n.d, - -). *Peristiwa 15 Agustus: India Merdeka dari Jajahan Inggris, Begini Sejarah dan Faktanya*. Retrieved from merdeka.com: <https://www.merdeka.com/jateng/peristiwa-15-agustus-india-merdeka-dari-jajahan-inggris-begini-sejarah-dan-faktany-kln.html>
- Narayanan, A. (2020, February 16). *Hubungan Hindu-Muslim di India*. Retrieved from medium.com: <https://medium.com/@charitn/hindu-islamic-relations-in-india-827461a58fa1>
- Narayanan, A. (2020, Februari 16). *Hubungan Hindu-Muslim di India*. Retrieved from medium.com: <https://medium.com/@charitn/hindu-islamic-relations-in-india-827461a58fa1>
- Nashrullah, N. (2020, Agustus 21). *Sejak Kapan Hubungan Hindu-Muslim di India Memburuk?*. Retrieved from republika: <https://www.republika.co.id/berita/qfer96320/sejak-kapan-hubungan-hindumuslim-di-india-memburuk>
- Nursalikhah, A. (2020, Agustus 07). *Aneksasi Kashmir Sebabkan Hubungan Hindu-Muslim Terbelah*. Retrieved from republika.co.id: <https://khazanah.republika.co.id/berita/qenav9366/aneksasi-kashmir-sebabkan-hubungan-hindu-muslim-terbelah?>
- Organizer. (2021, July 6). *AIMIM: Partai Politik Didirikan untuk Mempromosikan Kepentingan Nizam dari Hyderabad dan Menentang Integrasi Hyderabad*. Retrieved from organiser.org: https://organiser.org/2021/07/06/22982/bharat/mim/#google_vignette
- Pandu, M. (2020, Maret 5). *Konflik Muslim-Hindu di India adalah Buah dari Mayoritarianisme yang Melembaga, Alih-alih Agama*. Retrieved from islami.co: <https://islami.co/konflik-muslim-hindu-di-india-adalah-buah-dari-mayoritarianisme-yang-melembaga-alih-alih-agama/>
- reliefweb. (2022, Juni 28). *Kekerasan di Kashmir: Mengapa lonjakan pembunuhan menandakan tren baru yang tidak menyenangkan*. Retrieved from reliefweb.int: <https://reliefweb.int/report/india/violence-kashmir-why-spike-killings-signals-ominous-new-trend>
- Republik. (2023, Mei 15). *Melacak Awal Mula Islam di India*. Retrieved from republika.id: <https://www.republika.id/posts/40767/melacak-awal-mula-islam-di-india>
- Republika. (2022, November 27). *Kesultanan Mughal dan Dominasi Inggris di India*. Retrieved from republika.co.id: <https://islamdigest.republika.co.id/berita/rlzaxj2925000/kesultanan-mughal-dan-dominasi-inggris-di-india?>
- Republika. (2023, Agustus 2). *Saat Muslim-Hindu Bersatu di India, Penjajah Kocar-Kacir*. Retrieved from republika.id: <https://www.republika.id/posts/43821/saat-muslim-hindu-bersatu-di-india-penjajah-kocar-kacir>
- Rozi, I. F. (2023, - 1). *Mengenal Definisi Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Retrieved from binus.ac.id: <https://binus.ac.id/bandung/2023/01/mengenal-definisi-kekerasan-menurut-johan-galtung/>
- Sajjad, M. W. (2018). Examining the state of muslim minority under Modi's BJP since 2014. *Strategic Studies*, 19-36.

- Sajjad, M. W. (2018). Examining the state of muslim minority under Modi's BJP since 2014. *Strategic Studies*, 19-36.
- Shaban, A. (2018). *Lives Of Muslims In India Politics, Exclusion And Violence*. New York: Routledge.
- Shankar, S. (2021, April 13). *Tawaran Asaduddin Owaisi untuk Mendefinisikan Ulang Sekularisme India*. Retrieved from foreignpolicy.com: <https://foreignpolicy.com/2021/04/13/asaduddin-owaisi-muslim-india-secular-party/>
- Sharma, A. (2020). Tentang Perbedaan Antara Hinduisme dan Hindutva. *Filsafat dan Agama Asia*, 43-47.
- Sholekha, A. (2019, Desember 20). *Begini 12 Fakta Kehidupan di India Selama Penjajahan Inggris*. Retrieved from idntimes.com: <https://www.idntimes.com/science/discovery/amelia-solekha/begini-kehidupan-di-india-selama-penjajahan-inggris-c1c2>
- Sorongan, T. P. (2024, Maret 14). *Kronologi India Ketok UU "Singkirkan" Warga Muslim, Ini yang Terjadi*. Retrieved from cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240314071656-4-521778/kronologi-india-ketok-uu-singkirkan-warga-muslim-ini-yang-terjadi>
- Srivastava, N. (2019, Desember 12). *Bagaimana Perdana Menteri Narendra Modi membuat cemas Muslim di India*. Retrieved from bbc: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50756563>
- Sudha, R. (2020). Hindutva violence in India: Trends and implications. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 15-20.
- Tahier, D. (2018, Mei 16). *Warna-warni Pernikahan Adat Muslim India*. Retrieved from detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-4023145/warna-warni-pernikahan-adat-muslim-india>
- Taylor&Moghaddam. (1987, - -). *Realistic Conflict Theory*. Retrieved from psychologie. uni-frankfrut.de: https://www.psychologie.uni-frankfurt.de/68850406/Taylor_Moghaddam_1987_Realistic_Conflict_Theory.pdf
- Thapar, R. (2019, Mei 17). *Mereka Menjajakan Mitos dan Menyebutnya Sejarah*. Retrieved from nytimes.com: <https://www.nytimes.com/2019/05/17/opinion/india-elections-modi-history.html>
- toppr. (n.d, - -). *India Setelah Kemerdekaan*. Retrieved from toppr.com: <https://www.toppr.com/guides/history/india-after-independence/india-after-independence/>
- Truschke, A. (2023, Oktober 6). *Bagaimana Nasionalis Hindu India Mempersenjatai Sejarah Melawan Muslim*. Retrieved from time.com: <https://time.com/6320003/india-weaponizing-history-against-muslims/>
- Vaishnav, M. (2018, Oktober 11). *Apa Rahasia Kesuksesan Partai Bharatiya Janata (BJP) India?* Retrieved from carnegieendowment.org: <https://carnegieendowment.org/2018/10/11/what-is-secret-to-success-of-india-s-bharatiya-janata-party-bjp-pub-77477>
- Varshney, A. (2002). *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*. USA: Yale University Press.

- Verghese, A. (2018, Agustus 23). *Pemerintahan Inggris dan Kerusuhan Hindu-Muslim di India: Penilaian Ulang*. Retrieved from berkleycenter.georgetown.edu: <https://berkleycenter.georgetown.edu/responses/british-rule-and-hindu-muslim-riots-in-india-a-reassessment>
- Verghese, A. (2018, Agustus 23). *Pemerintahan Inggris dan Kerusuhan Hindu-Muslim di India: Penilaian Ulang*. Retrieved from berkleycenter.georgetown.edu: <https://berkleycenter.georgetown.edu/responses/british-rule-and-hindu-muslim-riots-in-india-a-reassessment>
- Waikar, P. (2018). Reading islamphobia in hindutva: An analysis of Narendra Modi's political discourse. *Islamophobia Studies Journal*, 161-180.
- Welle, D. (2020, Maret 6). *Umat Muslim dan Hindu di India Bersatu Lawan Kekerasan*. Retrieved from detikNews: <https://news.detik.com/dw/d-4928398/umat-muslim-dan-hindu-di-india-bersatu-lawan-kekerasan>
- Wilson, J. (2016, September 7). *Sudut Pandang: Mitos 'kuat' pemerintahan Inggris di India*. Retrieved from bbc.com: <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-37094519>
- Wirayudha, R. (2019, Agustus 08). *Konflik Kashmir Tiada Akhir*. Retrieved from historia.id: <https://historia.id/politik/articles/konflik-kashmir-tiada-akhir-P1Ro2/page/1>
- Wirayudha, R. (2019, Agustus 8). *Konflik Kashmir Tiada Akhir*. Retrieved from historia.id: <https://historia.id/politik/articles/konflik-kashmir-tiada-akhir-P1Ro2/page/1>
- Wirayudha, R. (2020, February 27). *Konflik Muslim-Hindu India dari Masa ke Masa*. Retrieved from Historia: <https://historia.id/agama/articles/konflik-muslim-hindu-india-dari-masa-ke-masa-P4nbM/page/1>
- Wirayudha, R. (2020, Februari 27). *Konflik Muslim-Hindu India dari Masa ke Masa*. Retrieved from historia.id: <https://historia.id/agama/articles/konflik-muslim-hindu-india-dari-masa-ke-masa-P4nbM/page/1>
- Wirayudha, R. (2020, Februari 27). *Konflik Muslim-Hindu India dari Masa ke Masa*. Retrieved from historia.id: <https://historia.id/agama/articles/konflik-muslim-hindu-india-dari-masa-ke-masa-P4nbM>
- Yanwardhana, E. (2022, January 16). *Ramai Seruan 'Genosida Muslim' di India, Ada Apa?* Retrieved from cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220116070944-4-307646/ramai-seruan-genosida-muslim-di-india-ada-apa>
- Zakaria, A. (2022, December 9). *The Ongoing Legacies of the Partition of British India*. Retrieved from asiasociety.org: <https://asiasociety.org/magazine/article/ongoing-legacies-partition-british-india>
- Zulfaijah, S. U. (2022, September 2). *Sinopsis Film India The Kashmir Files*. Retrieved from antvklik.com: <https://www.antvklik.com/sinopsis/562195-sinopsis-film-india-the-kashmir-files?page=1>